



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.35 s.d. 14.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P.NASDEM) – Wakil Ketua Komisi
V DPR RI
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai
bulan Mei 2023
2. Membahas Rencana Alokasi Anggaran menurut
Fungsi, Program, dan Prioritas Anggaran K/L TA
2024 masing-masing Unit Eselon I
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
17 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
2 dari 12 orang Anggota
1. Ir. Sudjadi
2. Harvey B. Malaihollo
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
2 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Cen Sui Lan
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
1 dari 7 orang Anggota
1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,
M.Si.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
4. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
1 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Lasmi Indaryani, S.E.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
0 dari 4 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. Mohammad Zainal Fatah)
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. T. Iskandar, M.T.)
3. Kepala BPSDM Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. H. Khalawi. A.H., M.Sc., M.M.)
4. Kepala BPIW Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW):

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023, kita mulai jam 10.35, ya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Saudara Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh
jajarannya, serta
Para hadirin yang berbahagia,**

Mengawali, rapat dengar pendapat hari ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga, pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 6 fraksi yang terdiri dari 10 orang Anggota, sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat dengar pendapat pada hari ini, dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)

Biar jangan tidur.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini, untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai bulan Mei 2023 dan membahas evaluasi, rencana, dan membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan Prioritas Anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing Unit Eselon I.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V, Sekjen, Irjen, dan Kepala BPSDM
beserta Kepala BPIW Kementerian PUPR yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 yang lalu, telah disepakati beberapa hal, di antaranya Pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 Kementerian PUPR sebesar 128,15 triliun, dari alokasi Pagu indikatif tersebut, alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal adalah sebesar 568,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain. Untuk layanan perencanaan anggaran, tata kelola administrasi pegawai, pembentukan produk hukum dan layanan informasi publik.

Selanjutnya, Inspektur Jenderal mendapat alokasi sebesar 91,2 miliar yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan internal Kementerian PUPR. Sedangkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh alokasi sebesar 425,1 miliar, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan di antaranya, pelatihan ASN, pengembangan talenta dan pendidikan

Vokasi Politeknik PU. Kemudian, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapat alokasi sebesar 141,6 miliar, yang akan dipergunakan antara lain untuk menyusun, untuk penyusunan rencana pembangunan infrastruktur wilayah pada beberapa kawasan prioritas dan penyusunan kajian strategis kewilayahan.

Selanjutnya, dengan...sejalan dengan itu dalam kesempatan ini, kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan Pagu ini, agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I, benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi, baik secara internal maupun eksternal agar terwujud pola kerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Perlu meningkatkan pengawasan internal dalam rangka meminimalisir temuan dan permasalahan dalam penggunaan anggaran.
3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM Infrastruktur, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang mampu meningkatkan inovasi dan profesionalisme...profesionalitas secara berkelanjutan.
4. Perlu meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Demikianlah, pengantar dari kami. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada para Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024, masing-masing Unit Eselon I. Untuk itu kami mempersilakan pada Pak Sekjen dulu, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Terima kasih banyak, Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Para Pejabat Tinggi Madya, khususnya Pak Inspektur Jenderal, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW, serta Rekan-rekan Pimpinan Tinggi Pratama yang bersama-sama hadir pada kesempatan kali ini,

Terima kasih banyak, Bapak Pimpinan, Ibu-Bapak para Anggota Komisi V DPR RI, yang kami hormati atas perkenan untuk bisa melakukan rapat dengar pendapat pada pagi hari.

Namun, mohon izin sebelumnya, tadi saya mendapatkan pesan dari, Pak Menteri, kemarin beliau lupa untuk melaporkan satu hal, terutama karena

ada perubahan pejabat di Kementerian PUPR. Jadi, yang hadir pada pagi hari ini, khususnya yang BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) adalah Pak Yudha. Mungkin Ibu-Bapak sebelumnya mengenal beliau sebagai Dirjen Bina Konstruksi. Ada perubahan tempat Pak Yudha di BPIW, sementara Pak Rahman Arif di Dirjen Bina Konstruksi.

Terima kasih Ibu-Bapak sekalian,

Izinkan kami melaporkan terkait dengan Kesekjenan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, unit organisasi Sekjen ini, terdiri dari 7 Biro dan 3 Pusat, mulai dari Biro Perencanaan Anggaran Kerjasama Luar Negeri, kemudian Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Komunikasi Publik. Ada tiga pusat yaitu Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, kemudian Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran strategis yang harus dikerjakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR pada tahun 2023, ada tiga fokus yaitu, peningkatan pelayanan kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kesehatan organisasi. Dalam hal peningkatan kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR, diupayakan dengan melakukan peningkatan dalam berbagai layanan.

Yang pertama adalah meningkatkan layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, barang milik negara, dan umum.

Yang kedua, meningkatkan layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai.

Ketiga, meningkatkan layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum.

Keempat, meningkatkan fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah.

E. Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik.

Dan terakhir, adalah meningkatkan layanan kajian dan pemantauan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam hal integrasi sistem informasi, dalam rangka melaksanakan transformasi layanan digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana kita ketahui bersama Pemerintah telah menerbitkan seperangkat peraturan untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan ini dikoordinasikan oleh Kemenpan tentu bersama-sama Kemenkomarves. SPBE di Kementerian Pekerjaan Umum antara lain

adalah layanan perizinan yang kita integrasikan kepada layanan di OSS, kemudian layanan perumahan dan data dan informasi.

Dalam hal peningkatan kesehatan organisasi, dilakukan melalui berbagai upaya antara lain peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian PUPR, ini yang selalu diukur setiap tahun, kemudian peningkatan kualitas tata kelola keuangan, dan tentu peningkatan nilai SAKIP Kementerian PUPR.

Oleh karena itu, sebagaimana diarahkan dan diputuskan di rapat kerja pada tahun lalu, bahwa Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023, sebesar 586,88 miliar dengan rincian, Belanja Pegawai sebanyak 94,66 miliar, Belanja Barang 449,75 miliar, dan Belanja Modal sebesar 42,46 miliar. Realisasi Keuangan Sekretariat Jenderal sampai dengan 5 Juni 2023, sebesar 177,88 miliar, atau 30,31% dan fisik sebesar 32,38%. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2022, yakni 30,21. Hingga pagi ini, dengan menggunakan aplikasi yang kami gunakan untuk *e-mon*, per tanggal 8 Juni pagi ini, progres keuangan telah...tentu telah berubah beberapa poin, karena kita melakukannya secara *online*. Angka pada pagi ini sudah 30,93%. Jadi, sudah meningkat dibanding, karena ini adalah per 5 Juni kemarin, 5 Juni, 30,31, tapi sekarang sudah 30,93.

Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal meraih sejumlah penghargaan, tentu ini adalah hasil kerja bersama di Kementerian PUPR, tapi ada penghargaan yang sangat spesifik kepada masing-masing unit organisasi, tetapi ada penghargaan juga yang diterima sebagai kementerian.

Yang pertama adalah penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, yang kami terima pada 27 Januari 2023 lalu.

Kemudian, anugerah dari Komisi Persaingan Usaha, ini adalah KPPU Award 2023 berupa *Trophy Madya*, Kategori Persaingan Usaha Tingkat Kementerian di pusat, diterima pada 16 Februari 2023. Kemudian, Kementerian PUPR juga dinyatakan sebagai peringkat pertama Kementerian dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar, yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden pada 15 Maret 2023, penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional, Baznas Award 2023, kategori Menteri Pendukung Zakat Sejahteraan Umat, pada 21 Maret 2023.

Berikutnya adalah penghargaan peringkat pertama, Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, atau yang biasa disingkat dengan NKK Tahun 2022. Ini diberikan oleh Komisi ASN atau KASN, Kementerian PUPR memperoleh kategori patuh dengan skor 379 dan indeks 0,95.

Penghargaan lainnya adalah Anugerah SPS Award Trophy Bronze Indonesia Magazine Award Tahun 2023, kategori *The Best Government* pada periode, pada Maret 2023 lalu, dan yang terakhir kemarin ada penghargaan dan Anugerah Merdeka Belajar 2023, di kategori Mitra Kementerian yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang kami terima pada 29 Mei 2023 lalu.

Pimpinan dan Anggota, Ibu-Bapak yang kami hormati,

Pada tahun 2024, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Kementerian PUPR, sebagaimana tadi sudah dibacakan dan sebagaimana keputusan raker kemarin, bahwa Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR 2024 ditetapkan sebesar 568,73 miliar. Berdasarkan jenis belanja, maka Pagu Belanja Pegawai dialokasikan sebesar 91,52 miliar atau 16,09%. Belanja Barang sebesar 195,66 miliar atau 34,40% dan untuk Belanja Modal dialokasikan sebesar 281,55 miliar atau 49,50%.

Pagu Anggaran tersebut dialokasikan, Pagu Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Sekretariat Jenderal yaitu yang pertama adalah pengelolaan perencanaan sebesar 44,48 miliar dengan target layanan utama antara lain administrasi pelaksanaan anggaran yang mencakup 689 satker, baik di pusat maupun di daerah, 45 rencana aksi nasional dan program tematik lainnya, ini adalah kewajiban Kementerian PUPR untuk menyampaikan *report* setiap tiga bulan sekali untuk memastikan bahwa rencana aksi di 45 jenis ini dilakukan.

Kemudian, perencanaan dan pemantauan atas 42 register pinjaman, dan 4 hibah luar negeri. Empat puluh dua pinjaman dan 4 hibah luar negeri ini digunakan secara bersama-sama oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Yang kedua, pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana, sebesar 27,65 miliar, dengan target layanan utama antara lain, layanan data dan informasi melalui EHRM untuk pegawai sebanyak 40.325 orang, serta manajemen sumber daya manusia. Dalam hal pengelolaan keuangan juga dialokasikan 23,7 miliar dengan target layanan utama antara lain, fasilitasi penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan. Dari 696 Kuasa Penggunaan Anggaran atau Barang, dan 12 laporan PHLN, penyusunan 8 NSP Bidang Keuangan, penyusunan 8 Laporan Pengendalian, Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN di Kementerian PUPR, serta penyelesaian rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dengan target 80% telah sesuai rekomendasi.

Untuk pengelolaan umum sebesar 175,99 miliar dengan target layanan utama antara lain, 13 lokasi rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung, 30 lokasi pemeliharaan lanskap dan prasarana lingkungan, 23 lokasi perbaikan sarana utilitas, layanan poliklinik, kantor pusat, dan kegiatan protokoler, pembinaan Anggota Satpam, sebanyak 220 orang dan pemantauan dan evaluasi penggunaan kartu identitas atau ID Card.

Untuk pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum, dialokasikan sebesar 20,41 miliar dengan target layanan utama antara lain, penyusunan 39 peraturan atau produk hukum, 75 penanganan dan pendampingan perkara, satu laporan dokumentasi dan informasi hukum, satu kegiatan monitoring kepatuhan *intern*, 25 fasilitasi

penyusunan kerja sama antar kementerian lembaga pemerintah daerah, dan 5 pendapat hukum. Di sini ada 75 penanganan dan pendampingan perkara, ini umumnya banyak gugatan, ada gugatan-gugatan yang kami harus *handle* dan mengikuti proses persidangan.

Untuk pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 38,46 miliar dengan target layanan utama antara lain, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penggunaan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN, serta optimalisasi pemanfaatan BMN di 34 provinsi, termasuk percepatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 2019-2021. Kemudian, penyusunan laporan BMN *audited* dan *unaudited* 2022, serta laporan BMN Semester I, penyusunan juknis pengelolaan BMN, sertifikasi tanah BMN sebanyak 33.689 bidang, serta sistem informasi e-BMN yang terintergrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman).

Pimpinan dan Anggota Bapak-Ibu yang kami hormati,

Dalam hal pengelolaan BMN, Pemerintah secara terpusat diinisiasi, dikordinasikan oleh Kementerian Keuangan sedang melakukan proses sertifikasi BMN, sertifikasi tanah. Dari 100% target nasional lebih dari 80% target itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, kami selalu mendapatkan penghargaan untuk hal ini.

Dalam hal penyelegaraan dan pembinaan informasi publik sebesar 36,54 miliar dengan target layanan utama berupa 679 kegiatan kehumasan, 154 publikasi di berbagai media, 552 bahan informasi Pimpinan, permohonan informasi publik, sehingga mencapai 100% terlayani dan pengelolaan perpustakaan. Untuk pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sebesar 34,5 miliar dengan target layanan utama adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 255 laporan termasuk di dalamnya ada 1.700 Kebijakan Menteri, 16 *policy brief* atau *policy memo* dan pembinaan 179 Jabfung Analis Kebijakan.

Dalam hal pengelolaan data dan teknologi informasi Bidang PUPR dialokasikan sebesar 133,94 miliar dengan target layanan utama antara lain, layanan data dan *sis...* dan informasi terhadap 4.302, *nih* mohon maaf ini, 40.326 Pegawai PUPR, pengelolaan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan portal 9 perizinan, kolaborasi digital dengan 2 *super apps*, dan 30.000 akun *collaboration*, pengembangan dan aplikasi Bravo atau.. dan Sahabat PUPR. Sebagaimana telah dilaporkan pada kesempatan sebelumnya, bahwa kami di Kementerian PUPR juga sudah memulai untuk memigrasi dari server yang dikelola sendiri dengan investasi yang sangat besar menuju pemanfaatan dan optimalisasi *cloud*, dengan demikian dapat dilakukan optimasi dan layanan yang jauh lebih handal.

Dalam hal penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah, dialokasikan sebesar 33,51 miliar dengan target layanan utama antara lain, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap 499 pemerintah daerah penerima DAK, Tahun Anggaran 2024, sosialisasi kebijakan DAK Tahun 2025 kepada pemda, dalam hal ini provinsi kabupaten kota, verifikasi data dan

penilaian usulan DAK Tahun 2025, bimtek penerapan standar pelayanan minimal Bidang PUPR, di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Pimpinan dan Anggota DPR, yang kami hormati,

Untuk meningkatkan kualitas, memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan, Sekretariat Jenderal PUPR telah melakukan transformasi di bidang pelayanan publik antara lain, ini melalui e-Pusaka untuk menyusun...dalam hal penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan PUPR yang berdaya guna. Bravo PUPR ini adalah *super apps* yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasi yang juga bisa diakses di *mobile*, di *mobile phone* para pegawai, ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan fitur antara lain, presensi, *human resource management*, kinerja, *monitoring*, JDIH, TNDE, dan Berita PUPR, berita singkat.

Pelayanan untuk publik terpadu, ini dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat proses layanan publik, dan kami jalankan ini juga disertai juga dengan *call center*.

Kemudian, untuk portal perizinan Bidang PUPR, untuk kemudahan dan percepatan berusaha yang telah terintegrasi dengan OSS yang dijalankan di BKPM. Kebetulan untuk integrasi dengan OSS ini, Kementerian PUPR menjadi contoh, karena kebetulan ini juga dikordinasikan oleh Kemenkomarves, dan kepada kami mendapatkan tambahan tugas untuk juga mereplikasi dan memberi *lesson learned* pada kementerian-kementerian yang terus berbenah untuk mencapai target integrasi ke OSS.

Yang pertama kali dilakukan untuk OSS ini adalah SIMBG, intergrasinya, sehingga ke depan terjadilah *single sign on*, jadi sekali *sign in* di tempat. Apakah dia di kementerian maupun dari BKPM, itu juga akan terkoneksi kesemuanya.

Dalam hal keuangan kita, kami juga membangun e-Keuangan untuk kemudahan pelayanan keuangan secara terintegrasi dengan fitur antara lain, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemantauan progres tindak lanjut LHP. Ini kemaren sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, kenapa kami melakukan, apa, kalau lihat progressnya ada percepatan dibandingkan berapa tahun sebelumnya, ini hasil kerja bersama seluruh unit kerja, unit organisasi, tentu dengan e-Keuangan ini proses monitoringnya diharapkan dapat jauh lebih kita perbaiki. Tentu ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan rekomendasi BPK RI yang kita kenal dengan Simonti, kemudian pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, karena kami juga, harus juga melaporkan bagaimana ketaatan pajak dari para pegawai yang dilaksanakan secara *online*, tentu bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak.

Kementerian PUPR saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi, ini sudah berfungsi mudah-mudahan ini dapat membantu kita semua untuk saling *nge-check*, mungkin nanti melalui para tenaga ahli Ibu-Bapak semua bisa

akses ke aplikasi ini, dengan demikian maka pergerakan atau status dari aspirasi yang pernah disampaikan dengan mudah bisa dimonitor.

Kemudian, Portal Data Spasial Infrastruksur PUPR, ini portal yang relatif besar ukurannya karena memuat banyak peta digital, bukan hanya infrastruktur PUPR yang sudah terbangun, tetapi juga yang sedang kita bangun di IKN dan bahkan untuk IKN, kita lakukan pemanfaatan sistem informasi geospasial infrastruktur ini plus *bulding information modeling* yang juga kami sajikan, dengan demikian jauh lebih bisa dimonitor, tidak harus selalu datang ke IKN, tetapi bisa juga dari Pusdatin.

Kemudian, portal data bencana yang terdampak kepada infrastruktur PUPR yang dapat diakses masyarakat melalui *platform* SITABA (Sistem Informasi Bencana). *Platform* ini kami siapkan agar apabila ada bencana alam, misalkan potensi banjir atau kekeringan kita, atau gempa sekalipun kita sudah bisa mengidentifikasi infrastruktur-infrastruktur PUPR yang mana saja yang kemungkinan terdampak.

Ibu-Bapak sekalian, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Demikian paparan kami, mudah-mudahan kami mendapatkan masukan untuk memperbaiki, meningkatkan layanan kami di Tahun Anggaran yang akan datang, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik kita lanjut ke Pak Irjen, silakan.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Pagi,
Salam sejahtera semua,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat dan kami hormati Bapak Pimpinan, dan Ibu-Bapak Anggota Komisi V,

Sesuai dengan agenda Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk kronologis anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023, Daftar Isian Proyek Inspektorat Jenderal

Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 90,26 miliar berdasarkan DIPA Nomor SP-DIPA 033.02.1622187/2023 tanggal 30 November 2022, di mana untuk Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 Inspektorat Jenderal telah merealisasikan sebesar 32,19 miliar atau ekuivalen 35,67% dengan realisasi capaian fisik sebesar 37,60%.

Kebijakan pengawasan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tiga fokus, yaitu:

1. Adalah, pengawalan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema, pengawasan terhadap kegiatan direktif dan strategis Tahun Anggaran 2023, serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR Tahun 2023.
2. Adalah, pengawalan terhadap penatausahaan BMN di Kementerian PUPR dengan tema, pengawasan terhadap perencanaan dan penatausahaan BMN di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR.
3. Adalah, peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas penyelenggara Sistem Pengawasan *Intern* Pemerintah dan penetapan penerapan manajemen risiko. Kedua, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, yang ketiga kepatuhan integritas aparatur serta kualitas pengendalian dan pengawasan.

Untuk realisasi pengawasan *intern* sampai dengan tanggal 31 Mei, telah dilaksanakan pelaksanaan audit berupa audit dengan tujuan tertentu meliputi penanganan pengaduan, baik penelitian awal dan audit lanjutan, verifikasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan pemeriksaan usulan daftar hitam.

Pelaksanaan *review* berupa *review* laporan keuangan dan unit organisasi tahun 2022, pengendalian *intern* pelaporan keuangan, usulan revisi anggaran, usulan kontrak tahun jamak, usulan dana penanganan bencana, dan pemberian tunjangan kinerja.

Pelaksanaan evaluasi berupa evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi usulan unit kinerja zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan berupa, pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP, dan APIP. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya di antara pendampingan, pembangunan Venue F1 H2O di Toba Lake, penanggulangan pasca gempa bumi Cianjur, safe audit aset jasa konsesi, *professional conference organizer* penyelenggaraan World Water Forum di Bali, pelaksanaan renovasi lapangan pertandingan dan lapangan latihan dalam rangka Piala Dunia U-20 Tahun 2023, peningkatan fasilitas penunjang kawasan Labuan Bajo, Tanamori, Provinsi Nusa Tenggara Timur, layanan klinik konsultasi dan pendampingan pengendalian gratifikasi.

Rencana pengawasan *intern* periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 berupa:

Yang pertama, kegiatan *insurance* seperti pelaksanaan audit, berupa audit kinerja pada level program dan operasional untuk seluruh unit organisasi

dan audit dengan tujuan tertentu antara lain, implementasi P3DN, infrastruktur perbatasan, ketaatan tugas, perbantuan, dan lain lain.

Kedua, pelaksanaan *review* berupa Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 untuk seluruh unit organisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2023 untuk Kementerian. Pelaksanaan evaluasi berupa implementasi SAKIP, penerapan manajemen risiko, penjaminan kualitas SPIP, tela'ah sejawat, dan tematik pengadaan barang dan jasa BSN. Pelaksanaan pemantauan berupa pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal.

Kegiatan *consulting* seperti pendampingan pembangunan infrastruktur IKN, penerapan manajemen risiko dan SPIP, pengendalian gratifikasi dan Siber Pungli, dan serta pembangunan budaya integritas.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya di dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya khususnya dalam pencegahan korupsi. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal telah menyelenggarakan internalisasi penguatan peran perempuan, istri pejabat, dalam pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR. Kegiatan ini merupakan kerjasama Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR dan Deputi Pendidikan dan peran serta masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di dalam kegiatan tersebut di mana ditargetkan sebanyak 2.179 peserta yang merupakan Istri Pejabat Perbendaharaan Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen, mengikuti kegiatan ini. Sampai dengan bulan Mei 2023, telah diadakan sebanyak 5 kegiatan dan telah diikuti lebih kurang 990 peserta. Kegiatan ini terseleng...direncanakan diselenggarakan sebanyak 10 kegiatan sampai di akhir Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, untuk mendukung proses bisnis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi kelembagaan sampai dengan bulan Mei tahun 2023, telah melakukan berbagai koordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal koordinasi pengamanan kegiatan proyek...proyek strategis nasional, prioritas nasional, dan pemulihan ekonomi nasional. Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal pengamanan proyek strategis yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda, Bidang Intelijen. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal perbaikan tata kelola, penyelenggaraan infrastruktur PUPR, dan pembinaan pendidikan peran serta masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP, dalam hal ini perbaikan tata kelola proses tender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengawasan persaingan usaha, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal kerja sama pengawasan dan

pembinaan auditor. Pelaksanaan telah menghasilkan realisasi laporan pengawasan, sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, sebagai berikut. Dari kondisi rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 900 laporan yang terdiri dari rencana audit 151 laporan dan realisasi sudah mencapai 130 laporan ekuivalen 86,09%.

Selanjutnya, untuk pengawasan, *review* dari rencana 182, sudah terealisasi 170, lebih kurang 93,40%.

Selanjutnya, untuk evaluasi dari 8 rencana laporan, sudah terealisasi sebanyak 5 laporan dengan ekivalen 62,50%, pemantauan dengan 441 dan sudah terealisasi sebanyak 382 laporan atau 86,62%, pengawasan lainnya 118 laporan sudah terealisasi sebanyak 109 laporan dengan 92,37%. Jadi, dari kondisi yang ada, dari rencana 900 laporan sudah direalisasikan sebanyak 796 laporan, setara dengan 88,46%.

Selanjutnya, di dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum selalu mendorong, satuan kerja di Kementerian PUPR untuk selalu melakukan penuntasan atas temuan BPK RI dari tahun ke tahun, penuntasan atau temuan BPK RI selalu meningkat, di mana tahun 2021 tindak lanjut yang telah memenuhi rekomendasi sebanyak 65,70%, dan di tahun 2022 temuan yang telah disesuaikan...yang sudah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 71,89%. Diharapkan, pada tahun ini terdapat peningkatan signifikan terhadap penuntasan atas temuan BPK RI dengan estimasi tingkat lanjut telah sesuai menjadi 80,17%. Sehingga dapat melampaui Target Nasional di 2024 sebesar 75%. Ini informasi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, pada saat rapat kerja kemarin.

Selanjutnya, untuk sesuai dengan tema RKP Tahun 2024 yakni peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, Inspektorat Jenderal berkomitmen melaksanakan pengawasan intern dengan fokus pada tiga hal yang akan dituangkan dalam, Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan Tahun 2024:

1. Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema Pengawasan Terhadap Kegiatan Direktif dan Prioritas di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024, antara lain pengawasan PSN, Strategis Nasional, IKN, P3DN, Penyelesaian Program 2020-2024, Rehab/Rekon akibat bencana, dan pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
2. Pengawasan Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian PUPR dengan tema Pengawasan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di seluruh unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk dalam rangka pengawasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan atas penyelenggaraan SPIP, penerapan manajemen risiko, peningkatan transparansi, akuntabilitas pengelolaan kinerja

dan keuangan, ini adalah pengawasan *mandatory*. Yang ketiga, peningkatan kepatuhan integritas aparatur serta peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang saya hormati,

Objek Pengawasan Tahun 2024 yaitu terhadap Pengelolaan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2024 sebesar 128,15 triliun, yang dikelola oleh 10 unit organisasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui, 186 unit pelaksanaan teknis atau balai pada 694 satuan kerja dan 2.252 Pejabat Pembuat Komitmen, di mana jumlah kegiatan kontraktual diperkirakan setara dengan kondisi tahun 2023, sekitar 6.035 paket dan kegiatan swakelola 17.125 kegiatan. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor sebanyak 197 orang, hal ini berdasarkan Data Objek Pengawasan Tahun 2023. Inspektorat Jenderal juga melakukan penanganan atas pengaduan proses pemilihan penyedia jasa, pengendalian terhadap informasi terkait sanggah, sanggah banding dan penyedia jasa yang ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal.

Kronologi Anggaran Tahun 2024, sebagai berikut: kebutuhan anggaran dalam Rencana Strategi Inspektorat Jenderal untuk Tahun 2024 adalah sebesar 136,4 miliar. Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal Tahun 2024 berdasarkan surat Menteri PUPR nomor...hal penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR adalah sebesar 91,23 miliar. Dengan kegiatan berupa dukungan manajemen bidang pengawasan dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Bidang PUPR. Nilai Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 91,23 miliar dengan penjelasan anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Belanja pegawai dan belanja barang sebesar 89,43 miliar yang terdiri dari, belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar 44,24 miliar, belanja barang sebesar 45,19 miliar, untuk kegiatan anggaran pengawasan *intern* 35,49 dan untuk pelaksanaan audit *review* evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dan kegiatan pengelolaan pengawasan *intern*, dan nilai 9,7 miliar digunakan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana perkantoran. Belanja modal sebesar 1,8 miliar untuk peningkatan prasarana perkantoran.

Terhadap pengelompokan indikasi kebutuhan anggaran, kegiatan Pengawasan Intern Tahun 2024, secara konkret dilaksanakan untuk, yang pertama pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu sebesar 11 miliar. Yang kedua, pelaksanaan *review* anggaran lain berupa *review* laporan keuangan rencana BUMN, usulan RKA K/L, usulan revisi anggaran, usulan kontrak tahun jamak dan usulan penggunaan anggaran penanganan bencana dan *review* tematik, sebesar 1,5 miliar.

Pelaksanaan evaluasi antara lain Evaluasi SAKIP, Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi, Evaluasi Internal Usulan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Evaluasi Efektivitas Penerapan, dan sebagainya senilai 1,8 miliar.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dan pemantauan lain, berdasarkan perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan permintaan unit organisasi sebesar 1,8 miliar. Pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib tingkat Kementerian, antara lain *review* keuangan kementerian, *review* laporan kementerian, *review* usulan perubahan RK BMN, dan lain sebagainya senilai 1 miliar.

Kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan intern Kementerian PUPR sebesar 2,5 miliar, pengembangan sumber daya manusia pengawasan Inspektorat Jenderal dalam bentuk Diklat, sertifikasi jabatan fungsional, sosialisasi bidang pengawasan dan *workshop* bidang pengawasan sebesar 5,7 miliar.

Selanjutnya, penyelenggaraan dukungan pengawasan berupa perencanaan, monitoring, evaluasi, dan administrasi kegiatan pengawasan senilai 7,67 miliar.

Mungkin demikian, Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang kami hormati yang bisa kami sampaikan, dan mohon arahan lebih lanjut, demikian.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi 2023 dan 2024, 2024 naik ya, naik satu koma sekian, Pak Sekjen turun, ya.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Itu Komisi V, Pak.

KETUA RAPAT:

Mulai. Lanjut Kepala BPSDM, silakan.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk semuanya,

Shalom,

Om swastiastu.

Namo budaya,

Salam kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V Ibu-Bapak Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR dan hadirin yang saya muliakan,

Izinkan, saya menyampaikan sesuai agenda yaitu Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa sesuai amanah Peraturan Menteri PUPR Menteri Nomor 13 Tahun 2020, BPSDM bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi melaksanakan pengembangan kompetensi bagi PNS, melalui pengembangan talenta, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi lainnya. Pagu Anggaran BPSDM Tahun 2023, sebesar 369,7 miliar dengan alokasi belanja pegawai sebesar 86,41 miliar, belanja barang operasional dan non operasional sebesar 273,1 miliar, serta belanja modal sebesar 40,3 miliar, selain itu terdapat *automatic adjustment* sebesar 6 miliar yang merupakan kebijakan nasional seluruh belanja K/L.

Realisasi anggaran akhir sampai dengan 6 Juni 2023, BPSDM sebesar kurang lebih keuangannya adalah 123,5 miliar atau 30,89% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 30,94%. Ini sudah naik 2021. Adapun capaian *ouput* kinerja utama untuk tahun 2023 sampai dengan bulan Mei adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah pengembangan talenta meliputi, pelaksanaan asesmen dengan capaian 1.906 orang dari target 4.500 orang atau sebesar 42,35%. Kemudian, pemetaan karir dengan capaian 117 orang dari target 219 orang atau 53,42%, dan pemantauan kinerja dengan capaian 90,41% dari target 94%. Kemudian, untuk kegiatan pelatihan meliputi, pelatihan klasikal dan non klasikal, Bimtek dan *workshop* dengan capaian 3.974 orang dari target 5.570 orang atau sudah 71,35%. Sedangkan, pendidikan meliputi pendidikan Magister Super Spesialis, S1 Teknik Sipil Uncen, dan D3 PKN STAN dengan capaian 581 orang dari target 550 orang atau 105,4%, serta Pendidikan Vokasi Politeknik PU dengan capaian 497 orang dari target 732 orang atau 67,9%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sampai dengan bulan Mei antara lain.

Yang pertama adalah pelatihan teknis dan manajemen PUPR telah dilaksanakan kepada 3.974 orang meliputi: Pelatihan Bidang SDA 1.050 orang, Bidang Permukiman 686 orang, Bidang Jalan dan Jembatan 750 orang, dan Bidang Perumahan 387 orang, serta Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 104 orang, Bidang Manajemen Kontruksi 437 orang, dan Bidang Manajemen Umum 560 orang.

Kami juga atas arahan Pak Menteri melaksanakan Pelatihan Bela Negara untuk pengembangan wawasan kebangsaan serta penguatan karakter ASN PUPR, direncanakan tahun 2023 itu ada 1.000 orang. Sudah dilaksanakan pertama di Pusdiklat Kopassus Batujajar sebanyak 289 orang, rencana tanggal yang tahap kedua adalah di Kopassus Serang Komando 1, Banten, sebanyak

200 orang, *insya Allah* dilaksanakan bulan Juli, dan nanti di bulan Agustus dilaksanakan di Kavaleri di Batujajar 300 orang, dan terakhir Komando 2 Kopassus Surakarta, sebanyak 200 orang.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II atau PKN II sedang dilaksanakan di Bandung yaitu tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Oktober 2023, dengan peserta kurang lebih 40 orang, dari PUPR dan dari Kementerian Lembaga lainnya. Sedangkan, Pelatihan Teknologi Informasi (IT), kerja sama dengan Purwadhika Digital Teknologi School di BSD Sinarmas Land ada 70 orang ASN, meliputi pelatihan data *science*, 20 orang, sedangkan untuk materi UI/UX dan *web development* akan dijadwalkan Semester II, Tahun 2023.

Selain itu, selain pelatihan reguler sebagai tindak lanjut masukan atau arahan dari RDP sebelumnya, BPSDM sejak tahun 2022 telah meningkatkan kerja sama pengembangan kompetensi dengan instansi daerah, instansi daerah, program kerja sama ini dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi para ASN di daerah kabupaten kota dan provinsi, khususnya Bidang PUPR.

Untuk kegiatan utama bidang pendidikan sampai bulan Mei, BPSDM telah melaksanakan Program Pendidikan Magister Super Spesialis dengan rincian terhadap siswa total hampir 417 orang, yang teknis dan non teknis 127 orang, totalnya ada 544. Ini yang teknis tersebar di UGM ada 128 orang, di ITB 134 orang, di ITS 85 orang, dan di UNDIP 70 orang. Sedangkan yang non teknis yang ada di Universitas Brawijaya 33 orang, Universitas Hasanudin 51 orang, Universitas Andalas 17 orang, dan UI 19 orang.

Karya Siswa Magister Super Spesialis Non Teknis ada 127 orang ini termasuk adalah di Binus yaitu di untuk program keamanan *cyber*, karena ini sangat penting ke depan dan juga kita di UI untuk Ilmu Komunikasi Public Relation, jadi sebanyak 19 orang. Karya Siswa S1 Teknik Sipil Uncen sebanyak 9 orang, dan Karya Siswa D4 STAN sebanyak 28 orang, sehingga total keseluruhan capaian Karya Siswa ada 544 orang. Untuk S1 Uncen ini, untuk tahun ini pendaftarannya cukup banyak 2023 ini yang tahap kedua ini, karena adalah satu-satunya beasiswa ke S1. Ada beberapa permintaan dari universitas lain yang minta dibuka program yang sama, kita sedang di...kita minta arahan Bapak Menteri.

Pada saat ini telah dilaksanakan juga proses rekrutmen magister super spesialis Teknik Angkatan 4 dengan jumlah usulan peserta sebanyak 250 orang. Selanjutnya, dapat kami sampaikan juga sebaran spasial, Karya Siswa magister super spesialis teknik dan non teknik S1 serta D4 secara nasional berdasarkan kondisi di wilayah barat, tengah, dan timur sampai dengan periode Mei 2023.

Kemudian, selain pelaksanaan kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi di dalam negeri, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, BPSDM juga melaksanakan program kerja sama pendidikan melalui LPDP yang mana ditargetkan setiap tahun minimal, minimal mengirimkan 100 orang ke luar negeri. *Alhamdulillah* di tahun 2022 sudah mencapai 84 orang, tahun ini

insya Allah akan bisa mencapai 100 orang. Biasanya tahun-tahun sebelumnya paling banyak setahun 76 orang, *alhamdulillah* dorongan Bapak Menteri dengan kuota khusus bisa mencapai moga-moga 100 orang tahun ini bisa dicapai.

Jumlah karya siswa penerima beasiswa LPDP sejak tahun lalu, ada 74 orang ditambah 10 orang untuk yang *loan* dengan dana donor lain dari negara lainnya, total ada 84 orang. Sedangkan untuk tahun 2023 ini kita sedang melakukan rekrutmen atau penjarangan, untuk tahap pertama lolos 84 orang dan tinggal wawancara, sudah wawancara tinggal menunggu apa kelulusannya, kemudian tahap kedua sudah terdaftar 74 orang, diharapkan seperti arahan Bapak Menteri 100 orang bisa tercapai.

Peningkatan jumlah kelulusan LPDP ini karena kita menyiapkan sebelumnya, jadi kita...kita lakukan pembekalan sebelumnya untuk TS, jadi kita memanfaatkan alumni maupun mahasiswa, karya siswa yang sedang yang ada diluar negeri menjadi narasumber, bagaimana cara melewati tes LPDP, karena kenyataannya bahwa tes LPDP ini sangat susah. Ini juga bisa disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah bahwa kuota LPDP itu sangat besar sekali, hanya terserap tiap tahun 50%, ini banyak yang tidak *tau* bahwa putra-putra terbaik kita di provinsi daerah segera bisa memanfaatkan Program Beasiswa LPDP. Selama ini, mungkin yang banyak di kementerian dan lembaga di pusat, mungkin untuk daerah saya kira mulai Bapak-Bapak Komisi V ini bisa disampaikan ke Pak Gubernur, Pak Bupati untuk bisa mendorong ikut LPDP ini.

Kemudian, untuk Rencana Alokasi Anggaran APBN Tahun 2024 untuk BPSDM adalah, yang disampaikan adalah, Pagu Indikatifnya adalah sebesar 425.138.972.000. Pagu Indikatif 2024 ini terdiri dari Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, itu untuk Poltek PU, di Semarang sebesar 100 miliar dan untuk dukungan manajemen sebesar 324.138.972.000, yang sebagian besar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan utama BPSDM seperti pengembangan kompetensi, baik pendidikan maupun pelatihan, pengembangan talenta, asesmen, pemantauan kinerja, dan pemetaan karir, serta dukungan manajemen melalui perkuatan lembaga, reformasi biokrasi, perencanaan penganggaran, monitoring evaluasi, kerjasama institusi dalam dan luar negeri, serta termasuk belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan.

Pagu Indikatif per jenis belanja terdiri dari alokasi belanja operasional sebesar 164,49 miliar, dan belanja non operasional sebesar 260,64 miliar. Prioritas anggaran dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan direktif Bapak Menteri PUPR terkait pengembangan kompetensi SDM sebagai pendukung terwujudnya reformasi birokrasi antara lain, pengembangan talenta meliputi *assessment* dengan target 4.000 orang, pemantauan kinerja dengan target 19.500 orang, dan pemetaan karir dengan target 860 orang.

Adapun untuk pelatihan, targetnya 7.981 orang meliputi Pelatihan Bidang SDA dengan target 900 orang, Bidang Permukiman 1.280 orang, Bidang Jalan Jembatan 1.176 orang, Bidang Perumahan targetnya 310 orang, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 300 orang, Bidang Manajemen

Konstruksi 990 orang, serta Bidang Manajemen Umum 2.865 orang. Pendidikan Magister Super Spesialis dilanjutkan, termasuk juga S1 Uncen, dan kemungkinan ada membuka baru beasiswa S1 di perguruan tinggi lainnya khususnya di wilayah timur, di Sulawesi maupun di Maluku, dan D3 STAN dengan target 520 orang, adapun pendidikan Vokasi Poltek PU, targetnya naik menjadi 860 orang.

Kegiatan BPSDM di 2024, meliputi, tadi, pengembangan talenta, pendidikan dan pelatihan. Kita akan melakukan beberapa inovasi dengan pelatihan melalui *full e-learning*. Jadi, bisa menyerap lebih banyak peserta untuk bisa melaksanakan mengikuti pelatihan ini. Untuk pengembangan kompetensi ASN kita akan teruskan Program Magister Super Spesialis dan Program S1 serta D4 tadi.

Demikian dapat disampaikan, mohon arahan dan masukan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. 2023 ke 2024 anggaran naik, Pak?

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. KHALAWI AH, M.Sc., MM):

Naik *dikit*, Pak

KETUA RAPAT:

Naik *dikit* ya, *oke*. Lanjut yang terakhir Pak Kepala BPIW, silakan Pak, ini BPIW baru ya, ya muka lama.

KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Bismillahirrahmannirrahim.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI beserta para Anggota Komisi V DPR RI, Pejabat Tinggi Madya dan juga Pejabat Tinggi Pratama yang hadir di pertemuan RDP pada pagi hari ini,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo budaya,

Salam kebajikan,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Ibu-Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Izinkan kami dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, melaporkan beberapa hal sesuai dengan topik rapat dengar pendapat pada hari ini *yaini* Evaluasi Pelaksanaan APBN BPIW Tahun 2023 dan Rencana Alokasi Anggaran Program Kerja BPIW Tahun 2024. Sebelumnya, kami menyampaikan kembali tugas dan fungsi utama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020, BPIW memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu, program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah.

Terkait dengan penjabaran tugas ini, Bapak Menteri, dalam berbagai kesempatan menegaskan kepada BPIW untuk berperan sebagai penjuror program infrastruktur PUPR dengan menggunakan pendekatan berbasis pengembangan wilayah. Selain itu, ada beberapa penugasan dari Bapak Menteri yang diberikan kepada BPIW antara lain, integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* serta percepatan peningkatan infrastruktur di kawasan industri strategis.

Pada tahun 2023, BPIW mendapat amanah alokasi anggaran dari 140,76 miliar. Kemudian direvisi menjadi 145,16 miliar. Penambahan alokasi anggaran ini merupakan luncheon dari pinjaman luar negeri untuk kegiatan *integrated tourism development project* sebesar 4,4 miliar. Alokasi ini untuk mendukung dua kegiatan yaitu, dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 67,9 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 77,26 miliar. Kegiatan dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah dialokasikan untuk gaji dan operasional sebesar 51,87 miliar dan layanan manajemen sebesar 24 miliar. Kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah bersumber dari Rupiah Murni sebesar 44,94 miliar dan PHLN sebesar 22,96 miliar.

Pemanfaatan alokasi digunakan untuk mendukung sekurang-kurangnya 5 fungsi BPIW, sebagaimana diarahkan Bapak Menteri yaitu: pertama, dalam rangka sinkronisasi program melalui Rakor Bangwil dan sinkronisasi program tahunan. Kedua, monitoring evaluasi untuk pelaporan kinerja tahunan dan monitoring wilayah. Ketiga, penyiapan dokumen perencanaan. Dan, keempat, penyiapan kebijakan dan strategi melalui penyusunan teknokratik Renstra dan penyiapan *input-input* kebijakan strategis bagi pimpinan seperti percepatan peningkatan infrastruktur di kawasan industri strategis.

Pemanfaatan alokasi PL...PHLN digunakan untuk mendukung kegiatan *Integrated Tourism Development Project* (ITDP) sebesar 16,4 miliar, dan Nasional Urban Development Project (NUDP). Komposisi Pagu BPIW pada tahun 2023 lebih didominasi oleh belanja barang yaitu 80% dari total alokasi anggaran BPIW. Berikut adalah progres pelaksanaan anggaran BPIW selama Mei 2023 di mana progres BPIW sejauh ini masih sesuai dengan rencana awal. Dapat kami laporkan bahwa per tanggal 6 Juni 2023, realisasi fisik BPIW adalah 36,02% dengan realisasi keuangan adalah 35,73% atau sebesar 51,87 miliar. Sebagai perbandingan rata-rata realisasi fisik Kementerian PUPR adalah 24,99% dan realisasi keuangan sebesar 23,34%. Progres realisasi anggaran BPIW sampai dengan Mei 2023, didukung oleh penyelesaian pekerjaan PHLN

ITDP, sehingga realisasi penyerapan keuangan juga lumayan tinggi yaitu sebesar 12,09 miliar.

Dalam rangka untuk menjaga realisasi anggaran sesuai dengan yang direncanakan, kami melakukan beberapa hal terutama penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan petunjuk operasional kegiatan atau POK, percepatan pelaksanaan survei, FGD, dan rapat koordinasi baik di level pusat dan daerah dalam rangka penyusunan dokumen rencana pengembangan infrastruktur untuk kawasan prioritas, pengalihan potensi anggaran yang tidak dapat diserap ke kegiatan lain yang lebih produktif, dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN yaitu kegiatan ITDP dan NUDP.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

BPIW telah menugaskan rangkaian, menuntaskan rangkaian pemrograman infrastruktur PUPR Tahun 2024 mulai dari rapat koordinasi keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau yang disebut Rakor Bangwil, bersama K/L dan Pemerintah Daerah, Kemudian konsultasi regional (Konreg) bersama Sekretariat Jenderal dan unit organisasi teknis yaitu Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan, serta BPIW mengawal agar prioritas pemrograman tahun 2024 difokuskan pada penuntasan pembangunan infrastruktur PUPR melalui kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Menteri yaitu program-program lanjutan atau yang *committed* seperti MYC, Multi Years Contract, OPOR, dan Direktif Presiden.

Berikut adalah progres penyelesaian target Renstra BPIW 2020-2024, di mana sesuai amanah RPJMN 2020-2024, setiap K/L termasuk Kementerian PUPR diarahkan untuk memberikan prioritas dukungan kepada pengembangan 249 kawasan strategis prioritas. Dalam hal ini, BPIW mendapat tugas untuk mengawal keterpaduan penanganan infrastruktur PUPR pada kawasan-kawasan tersebut agar investasi infrastruktur PUPR dapat menjamin, dijamin kebermanfaatannya, dan tidak semata pemenuhan target-target Pemerintah, namun juga sesuai dengan dinamika potensi dan prospek pengembangan kawasan atau wilayah tersebut.

Pada tahun 2023 BPIW akan menuntaskan perencanaan dan pemrograman 249 kawasan prioritas agar dapat dikoordinasikan kesiapan pelaksanaan pemrogramannya sebelum akhir periode RPJMN 2020-2024. Selain itu BPIW juga menuntaskan RPIW atau Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah provinsi yang telah disusun dengan melakukan penajaman pada kawasan-kawasan prioritas, yang antara lain, Jepara, Kawasan Industri Batang, Pulau Selaru, KSPN Taman Nasional Kerinci Seblat, Pulau Madura, serta kawasan industri prioritas yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu Kawasan Industri Tanjung Selor, KI Sorowako, KI Morowali, KI Konawe, dan KI Weda.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

Pada tahun 2023 Kementerian PUPR dan Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk membuat perencanaan pengembangan Kota Weda. Secara khusus Bapak Menteri PUPR mengarahkan agar BPIW dan Ditjen Cipta Karya bergabung dengan Tim Bappenas. Kemudian, juga Bapak Menteri PUPR memerintahkan agar penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (RPIP), itu diarahkan menjadi *master plan* di tiga kawasan industri prioritas yaitu, KI Weda Bay, KI Sorowako, dan KI Morowali. Berdasarkan pada arahan Bapak Menteri PUPR, usulan lokus dari RPIP dan kebutuhan dukungan kajian kewilayahan terkait dengan usulan penanganan jalan daerah, ditetapkan lima kawasan industri yang memerlukan *master plan* percepatan peningkatan infrastruktur yaitu, KI Morowali, KI Sorowako, KI Konawe, KI Weda Bay, KI Tanjung Selor.

Sebagai langkah konkret di internal BPIW telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tim Kajian Percepatan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur di Kawasan Industri Strategis. Tim BPIW dan Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan Tim Bappenas melakukan kajian pengembangan kawasan pemukiman dengan lingkup yang berbeda di tingkat, baik, di tingkat makro, meso, dan mikro.

BPIW bersama dengan Bappenas dan Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan survei di dua kawasan industri yaitu KI Morowali dan KI Sorowako sebagaimana dokumentasi yang terlampir.

Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati,

Evaluasi kebermanfaatan dilaksanakan untuk memastikan program kegiatan Pemerintah tidak hanya terlaksana, tapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya berorientasi pada proses pembangunannya saja, tetapi juga menjamin keberfungsian dan kebermanfaatan setelah terbangunnya infrastruktur tersebut. Evaluasi kebermanfaatan menghasilkan rekomendasi rencana dan program tindak lanjut yang diperlukan untuk selanjutnya dapat digunakan dalam Optimalisasi Program OPOR Tahun 2024, juga Rencana Program Tahun 2025. Dari total 38 provinsi dengan 179 infrastruktur yang perlu disurvei, telah dilaksanakan survei terhadap 106 infrastruktur.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

BPIW akan terus mengawal integrasi program penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 di Kementerian PUPR. Hal ini, merupakan keberlanjutan dan dari amanah pada BPIW sebagai koordinator dan integrator penanganan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR sejak tahun 2021. Hingga akhir tahun 2022, penanganan kemiskinan ekstrem mencapai 117 kabupaten atau kota dari target 212 kabupaten/kota, 21 dari target dan 25 provinsi dari 25 provinsi. Terdapat tiga tahapan penanganan utama dalam penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yaitu pengolahan data, survei kolaborasi, dan penanganan. Pada dua tahapan pertama, BPIW memegang

peranan terutama dalam integrasi data yang bersumber dari data P3KE (Pengsasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator (PMK) 30, Nomor 30 Tahun 2022.

Selanjutnya, data diolah untuk mengidentifikasi lokus-lokus prioritas dalam rangka integrasi program penanganan kemiskinan ekstrem di lingkungan Kementerian PUPR. Terkait pengolahan data ini, BPIW melakukan kerja sama dengan pengolahan dengan Kemenko PMK dan BKKBN. BPIW juga melakukan survei kolaborasi yang bertujuan untuk verifikasi dan validasi data, serta identifikasi kondisi lingkungan dan potensi *cluster* pemukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan bersama, dengan Kemenko PMK, BKKBN, DJCK, dan Ditjen Perumahan, serta Pemerintah Daerah.

Survei ini, menghasilkan jumlah rumah tidak layak huni dengan data *by name, by address*, potensi integrasi penanganan PUPR dan pemetaan *cluster* pemukiman. Pada tahap penanganan, BPIW terus melakukan koordinasi dalam mengintegrasikan program PUPR dalam penanganan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan melakukan koordinasi dalam penyusunan program penanganan bersama DJCK dan DJ Perumahan, melakukan kerja sama dengan Kemenko PMK dan Pemko Medan, dalam pena...dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Belawan, serta melakukan kerjasama dengan Kemenko PMK, Pemko Surakarta, serta *corporate social responsibility* (CSR) dari PT SMF, dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Solo.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sebagaimana unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, menjabarkan program 2024, sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana Kementerian PUPR melaksanakan Prioritas Nasional (PN), yang kedua yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta PN V, memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi pelayanan dasar. Program 2024 di BPIW turut mendukung hal tersebut. Bentuk dukungan BPIW pada PN II antara lain berupa kegiatan terkait rencana pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah, dan pelaksanaan sinkronisasi program tahunan. Sedangkan, dukungan terhadap PN V, antara lain berupa kegiatan evaluasi kebermanfaatan infrastruktur PUPR yang terbangun dan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting*. Berdasarkan tema tersebut, BPIW menyusun Program Kerja Tahun 2024, dibagi dalam 10 *cluster*.

Yang pertama adalah penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR berbasis wilayah. Yang kedua, penyusunan sinkronisasi program tahunan. Yang ketiga, penyusunan *monitoring* dan evaluasi. Keempat, penyusunan kajian kebijakan RPJM dan RPJMN bidang PUPR. Yang kelima, penyusunan kajian peningkatan kebermanfaatan. Keenam, fasilitas penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting*. Ketujuh, pelaksanaan kepatuhan intern. Kedelapan, fasilitasi dukungan manajemen internal BPIW.

Kesembilan, belanja pegawai dan operasional. Terakhir adalah belanja modal peralatan penunjang pekerjaan.

Berdasarkan *exercise* dengan menyesuaikan target kegiatan yang telah tercapai tahun 2022, BPIW memiliki Pagu Kebutuhan Tahun 2024, sebesar 231,78 miliar. Kemudian, sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor KU.0101, tanggal 24 Mei 2023, Hal penyusunan Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2024, BPIW mendapat alokasi Pagu Indikatif sebesar 141,60 miliar.

Bapak-Ibu Ketua, Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,

Dalam postur Pagu Indikatif Tahun 2024, terdapat anggaran belanja pegawai sebesar 31,62 miliar untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi 199 PNS BPIW. Belanja barang sendiri dari belanja barang operasional sebesar 21,10 miliar, dan belanja barang operasional BPIW sebesar 86,88 miliar, termasuk di dalamnya porsi Pagu Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 12,8 miliar, untuk melaksanakan kegiatan NUDP sebesar 4,52 miliar dan ITDP sebesar 8,28 miliar, sementara belanja modal 2 miliar untuk pemenuhan kebutuhan belanja dukungan peralatan kantor BPIW.

Target keluaran utama yang dihasilkan melalui alokasi Pagu Indikatif Tahun 2024, antara lain: rencana pengembangan infrastruktur termasuk hasil kegiatan ITDP dan NUDP yang bersumber dari pinjaman luar negeri, program tahunan yang terpadu, kemudian model analisis manfaat, pemantauan dan evaluasi, Renstra Kementerian PUPR itu untuk tahun 2025-2029, kajian kebermanfaatan infrastruktur PUPR, dukungan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting*, pendampingan dan pengembangan kepatuhan intern, serta fasilitasi dukungan manajemen internal.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan, atas perhatian Bapak dan Ibu Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih, kami mohon masukan dan sarannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Anggaran naik apa turun? Turun? Turun dikit? Oke. Baik, demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh para Pejabat Eselon I dari Kementerian PUPR. Selanjutnya, kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI, untuk melakukan pertanyaan dan pendalaman, yang sudah ada di sini daftar yang pertama Saudara Soehartono, Pak Soehartono silakan, bersiap-siap, Pak Syahrul Aidi.

F-P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua,
Wakil Ketua,
Anggota Komisi V, yang saya hormati dan saya banggakan,
Yang terhormat mitra kerja, Pak Sekjen berikut jajarannya,
Yang saya hormati Pak Irjen berikut jajarannya,
Pak Dirjen Badan Pengembangan Infrastruktur Pak Khalawi, dan
Pak Dirjen Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang saya
hormati dan saya banggakan,**

Saya ingin mendalami khusus pada Pak Dirjen Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. BPIW ini dideklarasikan atau di...berdiri tahun 20, seingat saya, ketika Badan Pengembangan Madura itu dibubarkan atau selesai, BPIW inilah muncul. BPIW muncul ini, berdasarkan prakarsa Pak Hermanto Dardak, almarhum. Kemudian, didukung oleh Anggota Komisi V, saya dan Pak Budi Yuwono, karena memang mempunyai kepentingan pengembangan BPIW itu di Selingkar Wilis, awal-awalnya seperti begitu. Tapi, tahun kedua yang berkembang itu justru tidak Selingkar Wilis, yang lain-lain, dan yang dilaksanakan sampai selesai itu di Jawa Timur, itu Selingkar Bromo, di situ ada jembatan kaca dan sebagainya, dan sebagainya. Selingkar Wilis tenggelam.

Selingkar Wilis pembiaya...pembiayaannya hanya rutin, atau dengan kata lain personal yang di-plot di Selingkar Wilis, itu aja belanjanya, seperti belanja tahun ini. Tahun ini kelihatannya juga begitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja barangnya cuma sedikit *gitu*.

Kemudian, waktu berjalan ada IKN, *udah*, tenggelam akhirnya. Seperti hari ini saya tidak mendengar dari Pak Dirjen tentang Selingkar Wilis, apa nasibnya *udah* hilang, atau sudah apa ya...sudah tidak beredar di Pak Dirjen, ini, ini masalahnya, Pak, mengapa Selingkar Wilis itu diusulkan saat itu, dan dimotori oleh almarhum Pak Hermanto Dardak ya, kebetulan beliau orang Trenggalek.

Selingkar Wilis itu ada enam kabupaten, enam kabupaten itu yang mempunyai desa di Selingkar Wilis, itu desanya tertinggal semua, mengapa? Karena konektivitas antar kabupaten itu belum baik atau belum sempurna, bukan berarti tidak ada. Jadi, Selingkar Wilis itu saat ini juga sudah ada, tapi kondisinya memprihatinkan, karena itu masih terdiri dari jalan-jalan kabupaten, bahkan masih ada jalan desanya. *Nah*, tujuan Selingkar Wilis itu ya, di samping untuk mengembangkan agro ya, konektivitas antar wilayah itu sambung, tujuan utamanya itu ya apa...mengurangi atau menghilangkan kemiskinan yang, yang apa ya, sangat tertinggal itu tadi, karena memang desa yang satu dengan yang lain itu seperti tidak berhubungan ya. *Nah*, oleh karena itu, itu diusulkan diusulkan dan dipaketkan yang namanya Selingkar Wilis.

Oleh karena itu, saya minta Pak Dirjen *gitu* ya, dan ini sekaligus pertanyaan itu, tadi disinggung *aja* tidak, apa sudah tidak beredar di BPIW, apa progres itu sudah hilang, ini yang saya tanyakan pada Pak Dirjen, ini perlu jawaban tegas, Pak. Karena saya selaku Anggota DPR yang dapilnya di situ, itu ditanya oleh para bupati, dan saat ini, Pak, para bupati itu sebagian mengalokasikan dana usulan Inpres itu di BPIW, di jalur itu. *Nah*, tentu saya

tanya pada Pak Dirjen, mekanisme apa yang nanti terjadi apabila para bupati itu mengusulkan alokasi yang di apa...istilahnya yang diprogres oleh BPIW ini kemudian secara fisik diambil oleh Inpres, *nah*, ini perlu, jangan nanti *eyel-eyelan nggak* jelas, karena BPIW punya otoritas, ya, kemudian bupati *nggak* punya otoritas, itu akan menjadi terbengkalai lagi, padahal bangunan itu diperuntukkan oleh untuk rakyat.

Saya tahu yang diekspos Pak Dirjen tadi, itu yang berbau ekonomi dan industri, Konawe segala macam itu baru itu, baru, BPIW muncul belum ada itu, itu muncul belakangan. Tapi, saya lihat pengembangan infrastruktur wilayah yang Pak Dirjen sebut tadi, orientasinya untuk ekonomi, pengembangan ekonomi, tetapi di selingkar Wilis ini, Pak, disamping mengembangkan ekonomi dari agro bisnis, bukan dari industri, yang Bapak sebut tadi itu dekat-deket dengan industri, jadi itulah itu.

Oleh karena itu, saya minta perhatian Pak Dirjen tentang Selingkar Wilis ini. Jadi, ini terus juga baik, tidak terus juga tidak apa-apa, karena ini bagian dari wilayah yang sudah berkembang, tapi lambat, *saking* lambatnya karena keterbatasan dana, daerah itu menjadi daerah miskin, apa istilahnya sekarang itu miskin ekstrem itu, seperti itu, Pak, sebenarnya konektivitas itu sudah ada, tinggal peningkatan saja. Saya kira itu, Pak, yang terpenting, karena ini bukan karena saya ikut terlibat dalam apa...mengusulkan tentang Selingkar Wilis, bukan semata-mata itu Pak, ya gitu, tapi Selingkar Wilis paling awal BPIW dibentuk, itu ada kata-kata Selingkar Wilis yang tujuannya seperti yang saya katakan tadi. Saya kira itu saja dari kami, yang lain tidak ada dan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Langsung, Pak Syahrul, bersiap-siap, Pak Sudjadi.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Makasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Sekjen,
Bapak Irjen,
Kepala BPSDM dan BPIW, serta
Jajarannya yang saya hormati,**

Saya sengaja hadir di awal karena serius ingin ikut rapat dengan Sekjen dan Irjen dan BPIW, khususnya BPIW ini. Saya pahami BPIW ini kebijakan-kebijakan anggaran di Dijen-Dirjen Teknis ini berangkat dari hasil kajian dari BPIW. Tadi saya melihat salah satu *output* dari pekerjaan BPIW ini adalah ada yang percepatan peningkatan infrastruktur, kemudian peran BPIW dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* begitu. Yang menjadi

pertanyaan saya di sini adalah ketika BPIW melakukan perannya dalam penanganan kemiskinan ekstrem, *kok* mitra yang dibawa adalah PMK dan BKKBN, sementara saya *nggak* tahu hubungannya dengan Kementerian Desa, ya. Karena kalau BKKBN data yang dapat adalah data kondisi masyarakat miskin yang sifatnya personal, kaitannya dengan rumah, ketersediaan air dan seterusnya. Padahal kalau kita ingin dapatkan data kemiskinan itu lebih komprehensif, dari desa yang akan lebih komprehensif, di Kementerian Desa kan ada indeks desa itu ada desa yang sangat tertinggal, desa tertinggal, dalam diskusi kami dengan Kementerian Desa itu, saya katakan di Kementerian Desa itu nomenklaturnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya bertanya mana, apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa dalam pembangunan daerah tertinggal, mereka katakan kami tidak punya anggaran untuk itu, karena anggaran Kementerian desa hanya 3 triliun dan lebih separuh itu adalah untuk belanja pegawai.

Di Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal saja, kegiatan mereka sangat kecil sekali, sementara yang mereka pikirkan adalah pembangunan daerah tertinggal, belum lagi berbicara dengan masalah desa sangat tertinggal di daerah yang bukan daerah tertinggal. Saya sempat bertanya kepada mereka di Kementerian Desa, itu pembangunannya di Kementerian PU katanya atau di daerah, kita tahu kalau daerah sekarang ini kondisi keuangannya sangat-sangat tidak, ya memadai untuk pembangunan, bahkan di satu daerah itu hanya 200 miliar untuk belanja modal, ada yang 100 miliar untuk belanja modal, di situ semuanya. *Nah*, saya berharap itu adalah dari Kementerian PU, tadi BPIW mengatakan di ada kontribusi BPIW ini dalam penanganan ekstrem, penanganan kemiskinan ekstrem, saya cuman saya khawatir dengan tadi hanya mitranya itu tidak melibatkan Kementerian Desa, saya ingin berharap.

Salah satu contoh, Pak, Pak Kepala Badan, itu di Riau, ada di Kabupaten Kampar, saya selalu sampaikan ini, ada satu kecamatan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, itu kalau tidak salah desanya ada 24 desa, 23 desa itu adalah desa sangat tertinggal, dan satu desa adalah desa tertinggal, Ibukota Kecamatan. Jadi, 24 desa itu ada 9 desa, bahkan lebih, ada 13 desa, itu berada di jalur sungai, Pemerintah Daerah sudah membuat jalan namanya Jalan Interpretasi, diberikan izin oleh kawasan hutan di KLHK untuk membangun akses mereka lewat darat, karena sekarang ini mereka hanya melewati sungai. Itu, akses lewat darat itu dibangunlah jalan seminisasi satu meter setengah, tapi pemerintah daerah itu *nggak* sanggup, Pak, karena ada jembatan yang harus dibangun, ada dananya luar biasa, bahkan pemerintah daerah buat bantuan keuangan ke desa, *ndak* sanggup mereka mengeluarkan. Selama tidak dibangun jalan, akses darat dan itu memungkinkan mereka ini tidak akan pernah keluar dari kemiskinannya.

Maka saya berharap pada Pak Kepala Badan, untuk pertama perlu kayaknya pelibatan Kementerian Desa di sini, kemudian dalam kegiatan-kegiatannya musyawarah, *Konreglah* bahasanya tadi juga, di daerah-daerah bersama pemerintah daerah, sebaiknya ke depan, Pak, undang juga kami, karena pola berpikrnya pemerintah daerah kadang-kadang, apalagi kalau pejabat-pejabat tertentu, Pak, tidak berpikir untuk lebih maju begitu, berpikrnya melakukan kegiatan-kegiatan rutin saja begitu.

Jadi, saya kalau saya ingin mengusulkan sekarang ini, untuk penanganan ekstrem di 13 desa ini dengan membangun jalan akses darat, memang tidak masuk di jalan daerah, karena memang mungkin di Cipta Karya, coba kalau dengan program PISEW tidak akan tertangani, Pak. Jadi, perlu kebijakan khusus untuk penanganan ini, lebih fokus kalau betul-betul kita menangani penanganan ekstrem, kemiskinan ekstrem, data itu, mana desa yang sangat tertinggal, kita bisa targetkan setahun, dua tahun yang akan datang selesai, tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. Desa yang sangat tertinggal itu salah satu faktor utamanya adalah akses, akses jalan. Dan, ada desa yang memungkinkan untuk dibuat akses jalan, karena kalau menggunakan akses sungai, Pak, ini sudahlah dangkal, airnya deras, itu biaya mereka membangun rumah itu tidak bicara di Papua, Pak, itu bisa 100 ribu satu sak semen, sementara kalau, bahkan lebih, mereka katakan harga satu sak semen itu sama...harga angkutnya sama dengan harga normalnya, begitu hitungannya, jadi dua kali lipat, kalau satu sak semen itu 65.000, maka harga semen sampai ke kampung itu 130.000. Jadi, *nggak* mungkin mereka ini keluar dari kemiskinannya, padahal hasil pertanian mereka melimpah, Pak, cuman karena akses ini membuat mereka tidak bisa menjualnya dengan harga yang mahal.

Kemudian, saya ingin sampaikan atas dasar rekomendasi yang saya pahami, BPIW ini kemudian anggaran-anggaran di Kementerian PU itu didistribusikan, terkait dengan infrastruktur pembangunan jalan daerah, Pak, saya ingin sampaikan bahwasanya dari data yang kami dapatkan, memang di Google saya ketemukan, bahwasanya jalan provinsi yang paling tinggi kerusakan dan paling panjang kerusakannya di Indonesia itu adalah Provinsi Riau.

Jadi, mohon berdasarkan dari data ini supaya bisa tertangani mengurangi persentase kerusakan jalan daerah itu, porsi untuk Riau ini mohon menjadi perhatian dari Kementerian PUPR, jadi tidak berbasis kepada adanya Anggota Komisi V atau tidak, tetapi memang itu berdasarkan kepada kebijakan yang ada di Kementerian PUPR, dan untuk jalan kabupaten kotanya kalau tidak salah, itu nomor 5 peringkat terburuknya atau terusaknya.

Kemudian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Kepala BPSDM, Pak Khalawi, saya berharap SDM Kementerian PU untuk di Balai Lelangnya, BP2JK, supaya tidak lama-lama, pegawai tidak hanya kepala balainya, Pak, tetapi pegawai yang ada di Balai Lelang itu tidak itu-itu saja, yang dikhawatirkan. Saya pernah bertemu dengan seseorang pihak ketiga, saya ditawari katanya, saya ditawari oleh orang Balai Lelang, jadi sudah punya, kan salah satu yang kita mutasi ini kepala-kepala balai supaya tidak ada apa namanya hubungan tertentu dengan, dengan seseorang begitu. Tetapi, kepalanya tidak, tapi staf atau panitianya yang...yang justru yang main, Pak. *Nah*, akan semakin banyak yang punya SDM untuk itu sehingga bisa dimutasikan atau masuk ke Balai Dirjen Teknis, Balai Teknis, atau Balai Lelang bisa dimutasi.

Kemudian yang keempat, saya ingin tanya, Pak, dulu di awal periode, kami mengusulkan waktu itu adalah bagaimana Kementerian PU ini membantu petani karet untuk peningkatan harga mereka, memang ada kebijakan waktu itu adalah bagaimana kita membuat aspal karet, Pak. *Nah*, satu tahun 2023 kita tidak lagi beli karet, saya ingin mempertanyakan ini, Pak, karena ketika kita beli tahun 2021, 2022, itu harga karet itu naik, Pak, *alhamdulillah* terbantu petani karet. *Nah*, sekarang ini tidak, tidak berlanjut lagi, sehingga harga karet sekarang sangat-sangat miris sekali, lebih murah, jauh lebih murah, tidak sampai satu kilo beras, setengah kilo beras, Pak, harga karet. *Nah*, itu mohon kalau ini kebijakan membeli karet ini kemudian mencampurnya dengan aspal itu bisa *worth it*, kalau bisa ini tetap dilanjutkan. Sehingga, ketahanan aspal kita bisa kuat, kemudian masyarakat kita juga terbantu. Karena salah satu tujuan daripada pembangunan, pembangunan itu adalah melibatkan juga masyarakat, apalagi kalau dalam teknologi ada istilah TKDN sekarang ya, TKDN itu bagaimana potensi dalam negeri ini kita manfaatkan untuk pembangunan kita. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya, Pak Sudjadi, siap-siap Ibu Cen Sui Lan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Bapak Wakil kedua, yang keduanya yang hebat-hebat dan saya banggakan,
Pak Sekjen bersama Pak Dirjen dan seluruh jajaran Eselon II,**

Saya tidak panjang-panjang, Tidak tanya, saya hanya *ngudoroso* sama saran.

Pertama adalah untuk Pak Sekjen, mohon DAK yang ada kaitannya dengan aspirasi Komisi V dikomunikasikan, biasanya yang ada kaitannya dengan komisi V itu air minum, irigasi, dan sebagainya, supaya ada integrasi yang bagus, dikomunikasikan aja, kita *nggak* akan campur tangan. Jadi, supaya tidak tumpang tindih dan terbangun sinergi di Dapil, lalu mohon DAK-DAK di Dapil di tempat Anggota Komisi V dikomunikasikan dengan Anggota Komisi V, bagi Komisi V yang mau, kalau saya mau, Pak, *gitu*.

Kemudian, BPIW Pak, saya minta bantuan Pak Sekjen. KSPN itu adalah Keppres. Jadi, Keppres itu menyangkut seluruh kawasan *tethek bengek* semuanya, yang diawali *master plan*. Menurut saya *master plan* KSPN itu melibatkan semua pemangku kepentingan yang lain yang punya otoritas di KSPN tersebut. Kita berpengalaman di Borobudur, karena perencanaan *bismil* Cipta Karya jalan sendiri, Bina Marga jalan sendiri, maka hasilnya kurang menguntungkan dan sekarang hampir semua *idle*.

Nah, oleh karena itu, saya mohon di Dieng termasuk kemarin sudah saya sampaikan Bu Diana, tolong *master plan*-nya dievaluasi lagi, sehingga nanti dokumen itu semua pemangku kepentingan tanda tangan setuju. Jadi, kita tidak hanya diakali cagar budaya Kalasan aja sampai UNESCO dan sampai sekarang kan *nggak* ada selesainya, hampir itu masih nuntut lalu dibalik minta anu museum dan sebagainya. *Nah*, *dagelan-dagelan* seperti itu harus kita hadapi dengan baik. Jadi, saya mohon Pak Sekjen, nanti dengan BPIW, Ibu, mbak...*anu* ada dulu, mbak sudah saya ajak, saya dengan bupati, tapi *nggak* ada yang datang tokoh-tokohnya, direktur juga *nggak* datang itu saya sampaikan, mbak siapa yang dulu yang *nemani* saya itu. *Nah*, itu pinter Pak, kalau itu saya anggap pinter, di samping cantik, *gitu*. Jadi, mohon *master plan* Dieng dievaluasi kembali, proyek boleh jalan, tapi jangan sampai nanti ada pemangku kepentingan pemerintahan tidak merasa bertanggung jawab dan, di sana itu hampir semuanya punya pemangku kepentingan, punya bukan punya kabupaten, *gitu*.

Lalu Bina Konstruksi, saya mohon izin walaupun tidak datang, saya akan mengajak Pak Kepala, *anu*, Pimpinan Bina Konstruksi ke daerah, akan saya kumpulkan Satker Bina Marga, Satker Cipta Karya, Satker Perumahan dengan BPIW terbuka, apa yang menjadi persoalannya, karena sering yang dimakimaki itu mesti apa yang harus tender-tender itu apa itu. Jadi, saya ingin melihat sebetulnya kayak apa *toh*, saya terbuka Pak, *alhamdulillah* setelah Kepala BP2JK-nya di Semarang diganti, dari Jogja itu hebat, demi Allah hebat, Pak, jadi lancar, tapi jangan sampai walaupun lancar lalu hasilnya pekerjaan itu banyak yang tidak baik, gagal, pemborongnya lari *ninggalkan* utang, kalau meninggalkan pacar lalu punya anak bukan urusan saya tapi itu, itu yang Bina Konstruksi.

Nah, lain-lainnya supaya tetap Bina Konstruksi itu pembangunannya bisa lebih tertib, lancar, taat azas, dan taat peraturan, ada kerja sama dengan balai, tapi tidak *kongkalikong*, artinya saling mengontrol. *Alhamdulillah* sekarang di Jawa Tengah, yang dulu tidak pernah, Pak, *udah* saya bilang itu setan semua, saya mohon maaf ya sampai *gitu tuh*, kumpul *aja nggk* pernah ketemu, takut. Jadi, peresmian proyek lain itu Kepala BPIW diundang *nggak* mau datang, *eh*, Kepala BP2JK itu *nggak* mau datang, katanya nanti menyalahi tupoksi. Jadi, peresmian proyek itu pernah *nggak* datang, *nah gitu*, tapi *Alhamdulillah*, Pak Sekjen, saya lapor betul-betul ini, hebat. Jogja dan lain-lain itu hebat, jangan dipindah dulu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selesai, Pakde? Bu Cen Sui Lan, siap-siap Pak Suryadi.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Kepala, Pak Irjen dari BPSDM dan
BPIW ya,**

Saya langsung *aja* ke BPIW, ada yang mau saya tanyakan Pak Kepala. Di penyelesaian target Renstra 2020-2024, ada DPP Baru Batam Bintan dan sekitarnya, apa maksudnya DPP, karena saya *nggak* mengerti ini, dan juga ada titik hijau lokus kawasan di luar target, jadi mungkin dibantu penjelasan. Juga saya ingin menyampaikan tahun lalu saya ada mengajukan untuk revitalisasi Istana Raja di Lingga, *nah* itu sudah ada komunikasi, bahkan Bappenas itu sudah datang survei, tapi saya tidak melihat ada kelanjutannya, bagaimana, apakah akan dilaksanakan atau tidak? Itu udah dua kali saya ajukan, karena memang harus *udah* ada penanganan revitalisasi. Dan, juga saya akan mengajukan penataan kawasan Pusaka Lingga, karena daerah saya ada Lingga itu, memang banyak peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan *heritage* yang harus kita lestarikan, bisa untuk pariwisata dan juga untuk religius, wisata religius. Jadi, mohon dimasukkan dalam perencanaan, agar tahun 2024 akan ada program itu.

Jadi, itu *aja* Pimpinan, terima kasih, sekian dari saya.

KETUA RAPAT:

Baik lanjut Pak Suryadi, siap-siap Pak Sigit.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pak Pimpinan serta rekan-rekan Anggota Komisi V,
Bapak Sekjen,
Pak Irjen,
Kepala BPSDM,
Pak Kyai, dan
Pak Kepala BPIW yang baru Pak,**

Terima kasih, ada beberapa poin yang barangkali perlu kami dalam. Yang pertama, terkait dengan hasil LHP BPK, ya memang kami juga mengapresiasi ya capaian-capaian itu, namun ada beberapa catatan di antaranya adalah temuan yang berulang ya, misalnya pada pemeriksaan 27 Mei 2002 dan itu juga ditemukan pada 24 Mei 2021, terkait dengan kesalahan dalam pengalokasian belanja ya, yang harusnya belanja barang tapi jadi belanja modal, *gitu* ya.

Nah, ini kita tidak tahu ini faktornya apa, apakah mungkin pedoman atau petunjuk penyusunan penganggaran ini atau kesalahan menterjemahkan oleh Unor *gitu* dan seterusnya, saya kira ini harus dituntaskan *gitu* ya, harus dicari, dan kalau memang perlu definisi dari setiap *item* belanja ini juga harus tersosialisasi dengan baik bagi para pejabat di setiap Unor *gitu*, karena masalahnya ini berulang ya, walaupun secara kumulatif temuan BPK ini ada kecenderungan berkurang ya, tapi ada *item-item* yang tidak mengalami

perbaikan, salah satunya adalah kesalahan dalam...salah kamar ya, sehingga itu menjadi temuan yang terus berulang.

Kemudian yang kedua, barangkali perlu ada fleksibilitas juga di dalam pengelolaan aset ya, terutama aset modal yang sudah tidak terpakai, saya ambil contoh, Pak, di balai di tempat kami di NTB, ada rangka baja yang sudah lama tidak terpakai, mungkin karena sisa dan seterusnya ya, tetapi itu tidak dimanfaatkan, kemudian masyarakat membuat surat untuk bisa dimanfaatkan, tetapi karena ini masih tercatat sebagai aset, ya tidak bisa diapa-apakan gitu ya, padahal juga *nggak* bisa difungsikan *gitu* ya. Maksud saya mungkin perlu secara rutin untuk mengevaluasi aset-aset yang sebetulnya *Idle* dan itu bisa difungsikan, di hibahkan atau seperti apa. Jadi, karena PU ini kan salah satu kementerian yang kaya *gitu* ya, punya aset begitu besar ya, aset jalan, jembatan, material, dan alat-alat berat *gitu* ya. *Nah*, selama memang itu tidak berfungsi, ya barangkali ada mekanisme tersendiri nanti di internal agar setiap saat aset itu bisa dihibahkan atau difungsikan ya, agar di satu sisi masyarakat kita sangat membutuhkan, tapi di satu sisi ada aset kita yang tidak bisa dipakai ya, karena prosedur manajemen pengelolaan aset.

Berikutnya terkait dengan di BPIW, ya, ini saya kira secara umum kalau terkait dengan perencanaan, aspek-aspek teknis saya tidak meragukan kompetensi tenaga ahli kita, tetapi yang sering menjadi masalah itu adalah kesalahan dalam mengambil kebijakan untuk setiap bangunan-bangunan atau *project-project* strategis, ya. Misalnya kita membangun satu infrastruktur, kemudian tidak efektif ya, infrastrukturnya berkualitas, perencanaannya bagus dari aspek teknis ya, tetapi keterkaitan dengan sektor-sektor lain ini kadang-kadang kurang ya, termasuk dengan kementerian dan lembaga lain. Misalnya kita di Komisi V ini kan ada mitra dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, ya, tentu butuh akses jalan di situ, kita masuk seperti apa.

Nah, ini banyak pelabuhan-pelabuhan kita yang akses jalannya tidak memadai, karena mungkin kita melakukan perencanaan sendiri-sendiri ya, demikian juga kementerian lain, bahkan di internal Kementerian PU di antar Unor ya, harusnya ada integrasi program, misalnya kita membangun jalan, ternyata di situ ada saluran irigasi, *nah* ini mungkin perlu ditingkatkan lagi koordinasi dalam perencanaan pembangunan ya, kita belum lagi bicara tentang proyek-proyek strategis nasional yang misalnya ada bandara kita yang tidak beroperasi karena akses jalan ke sana yang belum memadai atau faktor-faktor lainnya. Jadi, perencanaan yang lebih integral ini saya kira penting menjadi dasar kita dalam menetapkan kebijakan untuk membangun suatu infrastruktur, atau bendungan kita sudah jadi tapi setelah sekian tahun baru dibangun misalnya spamnya atau air minumnya *gitu*, air bakunya *gitu* ya, itu karena padahal satu kementerian cuma beda Direktorat Jenderal, maksud saya ini perlu ditingkatkan.

Berikutnya, ini terkait dengan pengembangan SDM, Pak Kyai ini, saya kira kita mendukung agar kompetensi kualitas dari tenaga-tenaga ahli kita selain jumlahnya, apa selain kualitasnya, juga jumlahnya. Tapi, yang menjadi catatan saya adalah penyebarannya, Pak, ya karena dalam data yang kami

terima misalnya tenaga-tenaga ahli kita misalnya yang penerima Program Magister Super Spesialis, ini sebagian besarnya ada di Jakarta dan sekitarnya, ya, di NTB cuma dua orang, Jakarta 100 orang *gitu* ya, ya tentu ini tiga faktor ya, pertama adalah kualitasnya kita tingkatkan, kemudian kuantitasnya jumlahnya, tapi kalau tidak tersebar merata, saya kira kurang pas juga *gitu*. Jadi, untuk melengkapi kualitas dan kuantitas yang terus kita tingkatkan, ini penyebarannya harus lebih merata, agar setiap ada kebutuhan-kebutuhan tenaga di berbagai daerah itu tidak harus orang Jakarta yang datang ke sana, tapi memang tenaga kita sudah menyebar di setiap daerah.

Termasuk juga kerja sama dengan perguruan tinggi, Pak, ya, pendidikan vokasi maupun, saya mengusulkan agar almamater saya Universitas Mataram ini juga bisa dimasukkan sebagai salah satu mitra dalam pengembangan SDM ini, karena perguruan tinggi yang diajak kerja sama ini juga terpusat di Jawa dan beberapa kota-kota besar, tapi daerah-daerah yang sebetulnya dibutuhkan untuk dukungan agar bisa lebih maju juga ini perlu ditambahkan ya. Jadi, itu Pak Khalawi terkait dengan apa namanya...pendidikan vokasi dan super spesialis ya, dalam...karena kami baca datanya ini ada yang kosong ini beberapa provinsi termasuk NTB, ya, supaya kerjasamanya ini lebih...lebih tersebar merata gitu.

Itu beberapa hal, Pak Ketua, ya, adapun yang terkait dengan apa namanya perencanaan dan lain-lain, saya kira ini nanti lebih detail pada Direktorat Jenderal berikutnya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. lanjut Pak Sigit, siap-siap Pak Willem Wandik.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Terima kasih, Pak Ketua.

**Bapak-Bapak, Pak Sekjen,
Pak Irjen,
Pak Dirjen, dan seterusnya semua yang hadir,
Yang saya banggakan teman-teman Komisi V,**

Ada satu informasi Pak, ini mungkin saya sampaikan entah kepada Pak Sekjen atau kepada Pak Irjen. Saya sudah membantu satu daerah dengan rusun. Rusun yang menjadi salah satu aspirasi dari Komisi V, Anggota Komisi V, itu tidak semuanya bisa kami tempatkan di Dapil, karena kami ini partai politik yang juga terkait dengan anggota-anggota dari komisi-komisi yang lain, kami sering bertukar program, sehingga bisa jadi kami menaruh di Dapil yang menjadi milik dari teman kami yang ada di Dapil yang lain, saya hentikan dulu Pak Dirjen, biar Bapak bisa menikmati kopi sama teh, dari pada saya *ngomong* Bapak menikmati kopi teh, kan susah saya.

Jadi, saya suatu ketika menaruh program rusun di NTT, tepatnya di Larantuka untuk membantu *Diusis* di Larantuka ya, untuk asrama, asrama *Diusis*, *Diusis* itu semacam pesantren tapi Katolik Pak, ya, mereka membutuhkan, kebetulan apa namanya...di Larantuka itu ada seorang kader PKS ya, walaupun dia bukan Anggota DPR, jadi akhirnya saya taruh di sana. *Nah*, dalam perjalanannya dibangun, tetapi sepertinya tidak selesai dengan baik, masih meninggalkan hutang kepada vendor-vendornya, saya tanya siapa pemenangnya, pemenangnya dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan.

Saya berpikir Pak Sekjen atau Pak Irjen, ya, tidak adakah sebuah mekanisme yang bisa menjamin bahwa pembangunan di daerah-daerah yang hanya 10 milyar, 18 miliar, 8 miliar, 4 miliar, 3 miliar itu bisa dilakukan oleh kontraktor setempat, bayangkan seorang kontraktor dari Sulawesi Selatan ya, menang tender di NTT, ya nanti subkonnya adalah kontraktor dari Larantuka NTT *nggak* masuk akal ya, *nggak* masuk akal, mungkin karena ukurannya hanya ukuran nilai penawarannya yang lebih rendah. Saya mohon Pak Sekjen atau Pak Irjen atau Pak Kepala apa namanya...Bina Konstruksi, untuk membuat aturan misalnya dibuat *scoring*, bukan hanya semata-mata apa dari pemenang tendernya itu dari harga yang paling murah ya, ada skor-skor misalnya dia adalah kontraktor lokal nilainya 3 misalnya, kontraktor di luar daerah yang jauh nilainya 1, kontraktor di daerah tetangga misalnya provinsi tetangga nilainya 2, dengan *scoring* itu kita, kita akhirnya bisa memberi peluang kepada kontraktor-kontraktor yang ada di lokal itu untuk bisa menang. Akhirnya sekarang siapa yang kesulitan, yang kesulitan adalah kontraktor yang jadi Subkon dari perusahaan itu.

Jadi, Pak Dirjen yang pertama, *eh* Pak Dirjen, ya Pak Sekjen atau Pak Irjen yang pertama pertanyaan saya tadi terkait dengan mekanisme lelang ya, siapakah yang *ngurus* ini, saya kasih masukkan *aja*, mungkin Pak Sekjen kayanya yang paling bisa ini ya, dan kita masih banyak *loh* aspirasi, seperti inpres jalan misalnya, inpres jalan saya berharap inpres jalan yang ada di Dapil saya itu dimenangkan oleh kontraktor lokal, cuma 50 miliar, saya hanya mengusulkan dua, atau tiga kalau bisa ya, masing-masing 50 miliar, kalau ada 3 kan, kalau itu yang menang di apa namanya...di kontraktor setempat itu kita ada *added value*, ada nilai tambahnya, ada suara yang saya bisa dapat ya, tetapi kalau kontraktornya dari Jakarta, nanti Subkon dari, aduh.

Demikian juga dengan rusun ya, jadi yang kedua tadi yang pertama kan masalah lelangnya, yang kedua masalah tempatnya, mohon kepada Pak Sekjen, Pak Irjen dan mungkin lewat Pimpinan kepada teman-teman Anggota izinkanlah kami menaruh rusun yang tidak seberapa itu di luar...di luar Dapil, karena di Dapil kami terus terang sudah beberapa kali dapat rusun seperti di Surabaya itu kita berikan rusun untuk asrama Pesantren Hidayatullah ya kan, nah kami kan partai PKS ini kan Partai Nasional, Pak Dirjen, kami juga satu ketika ingin bantu juga dari teman-teman yang Nasrani atau yang Katolik *gitu*. Jadi itu yang kedua, izinkanlah tanpa mekanisme yang rumit, ya, kami ingin lokasi yang di luar Dapil, karena kita ini Anggota DPR RI bukan Anggota DPR dari Dapil I, Jawa Timur.

Yang ketiga, adakan sebuah cara agar lokal itu bisa menang, dengan cara membuat kriteria dan membuat apa *scoring* atau apa *gitu*, sehingga kontraktor lokal itu bisa mendapatkan pekerjaan. Ini sekaligus laporan kepada Pak Irjen di Larantuka, Pak Irjen, Rusun Larantuka itu *nggak* jadi dengan baik ya, dan masih meninggalkan hutang kepada para vendor atau Subkon yang ada di sana, mudah-mudahan bisa dibantu untuk mengatasinya. Saya kira itu mau tanya lain-lain, kayaknya yang penting itu saja, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih. Pak Willem, siap-siap, Pak Syarif.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S. Sos.):

Baik, Pak Ketua.

**Ibu-Bapak Komisi V,
Pak Sekjen,
BPIW,
BPSDM, dan
Irjen.**

Dari kami berangkat dari peranan BPIW dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan *stunting* yang melakukan pengelolaan data dari hasil koordinasi dengan Kementerian PMK dan BKKBN. *Nah*, bersumber dari hal tersebut dihasilkan data PKA (Pengentasan Kemiskinan Ekstrem), bersumber dari Kemenko seperti yang dipaparkan tadi nomor 30, 2022, dimasukkan dalam program yang ada pada Direktorat Penyedia Perumahan, yaitu Program BPS, dan tiap Anggota Komisi V diwajibkan untuk mengakomodir 20% dari aspirasi Anggota masing-masing.

Akan tetapi, ada permasalahan yang terjadi ketika data tersebut kami lakukan verifikasi oleh Tim Penataan di lapangan. *Nah*, ternyata banyak yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat untuk menerima program tersebut, dan sudah verifikasi oleh pihak Balai Perumahan Papua, hal ini sesungguhnya juga memberatkan kami, Anggota Komisi yang memiliki aspirasi maupun juga tim yang ada di lapangan masing-masing, karena kami masing-masing memang datang dengan memiliki karakteristik yang begitu beragam. Katakanlah kami dari luar pulau, itu memang memiliki daerah-daerah yang mengakses yang tidak mudah dijangkau, jauh dari jangkauan dan sentuhan kultur modern, peradaban, dan juga jangkauan dari dan tujuan. Sehingga, ini juga kami dihadapkan pada satu persoalan tersendiri, sehingga aspirasi yang seharusnya bulan ini harus jalan tapi tidak jalan, mengapa, karena SK dari Dirjen Perumahan belum terbit dihadapkan pada persoalan yang tadi. Misalnya, di sini dari 400 data PKE, hanya 179 yang terverifikasi dan tersisa 221 tidak memenuhi kriteria, kriteria tidak terpenuhi karena situasi tadi, dan juga oleh dan hal ini Kementerian PU-Pera juga oleh BPIW perlu mencari perhatian, karena

data apa...karena dampak dari hal ini sampai sekarang ada sejumlah daerah di Papua, program BPSD tidak jalan.

Dan, untuk BPSDM kami mengharapkan supaya dalam Program BPSDM ini, coba juga perhatikan SDM kami di wilayah timur kalau ada dari sekian pegawai kami yang ada di timur sana yang ada di bawah Kementerian PU-Pera, kalau ada yang sudah memiliki kompetensi, ya kirannya bisa direkrut, supaya bisa masuk ke kementerian di pusat supaya ke depan bisa di, bisa diikutkan dalam promosi jabatan di masa-masa mendatang.

Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Willem. Lanjut, Pak Syarif. Terakhir ya.

F-P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Masih ada rupanya Pak Tamanuri, Pak. Makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan rapat yang saya hormati,
Pak Sekjen beserta seluruh Eselon I, Pak Khalawi, Pak Inspektorat.**

Pak Yudha sekarang jadi *anu* ya, BPIW ya, saya masih ingatnya Binkon saja *nih* Pak, tadi kalau Binkon kita mau berapa titik lagi kita itu, pelatihan *gitu*.

Baik terima kasih, pertama, pada Pak Sekjen yang hadir pada hari ini, pertama kami kepada SDM *nih*, Pak Khawali. Saya beberapa melihat SDM kita, terutama mungkin perlu saya hitung secara rasional berkaitan dengan kebutuhan dengan sumber daya manusia, tapi saya secara detail tidak mengetahui itu, tapi ketika saya beberapa melihat kondisi berkaitan dengan itu, memang banyak, ada beberapa keluhan kaitan dengan kekurangan terhadap sumber daya manusia, karena ini akan membawa dampak, efek kepada pekerjaan-pekerjaan, Pak.

Ya, tentu ini perlu ditata betul ya, contohnya umpamanya kemarin saya di Bikon, tanya dengan BP2JK-nya ini kenapa, ya memang kita ini, kita ini kekurangan sumber daya manusianya Pak, karena ini pasti akan membawa dampak *gitu*, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada, karena saya langsung nanti kaitan dengan beberapa permasalahan umpamanya di Bikon ya...ya, terkait lamanya terhadap analisa, dan ini mungkin Pak Sekjen harus ada standar sebagaimana yang disampaikan tadi, sehingga masyarakat itu bisa menerima, tidak timbul tanda tanya *gitu*, terhadap apa yang menjadi produk dari Bikon kaitan dengan umpama pekerjaan, karena masih terjadi juga hal-hal yang menang umpamanya, yang dikalahkan kemudian yang nanti yang kalah itu, yang menang itu juga pada saatnya nanti syarat-syarat yang dia tidak bisa *kok* si A bisa menang *gitu*, itu ada yang terjadi.

Yang kedua, kaitan tadi juga, supaya adil dan jelas, ya memang harus ada cek fisik, Pak, karena apalagi nanti e-katalog, e-katalog ini juga perlu juga ada suatu aturan yang juga harus baik *nih*, kalau tidak nanti ada yang monopoli *nih*, ya, karena memang e-katalog ini kan bisa subjektif juga melihatnya dari beberapa syarat-syarat yang ada. Ini kan harus juga jangan sampai terjadi nanti ada monopoli perusahaan-perusahaan tertentu yang dimenangkan, termasuk ini kaitan dengan ini, ya umpamanya tadilah dari luar cuma hanya syarat-syarat administrasi, ada IMP, apa macam-macam itu, tapi ketika di lapangan juga tidak ada, atau dia sub kepada pihak lain. Ada juga yang kedua, karena tadi syarat, dia punya di situ *nggak* ada, akhirnya ketika menang baru dia dipindahkan ke tempat yang bersangkutan. *Nah*, ini itu saya kira harus inilah, jangan hanya formalitas, jadi harus ada juga berkaitan dengan pembuktian fisiknya itu.

Yang kedua, kaitan dengan masalah syarat-syarat di Bikon itu juga, yang harus apa namanya...sebenarnya yang paling banyak itu kelemahannya kalau saya lihat berkaitan dengan sumber daya manusianya. Syarat dia tidak ini umpamanya ya, pekerjaannya di situ, personalnya, siapa-siapa di situ. Kalau bagi mereka yang ada sedikit ini, di situ yang dicari biasanya, ditelepon, kalau tidak dilepaskan. *Nah*, ini juga harus ada pola sebagaimana, ya paling tidak kita kan meminimalkan hal-hal itu untuk diperkecil tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Ini tentu kaitan dengan, berkaitan dengan SDM.

Yang kedua Pak Sekjen, kaitan mungkin karena ini diregulasinya di Sekjen, walaupun nanti teknisnya ada di masing-masing kedirjenan. Ada program-program kita itu yang mungkin perlu penyesuaian di lapangan, contohnya seperti PISEW, ya, PISEW itu syaratnya minimal dua desa yang berdekatan, kita di daerah-daerah termasuk daerah saya ini, ada yang satu beberapa desa itu, desa itu kepulauan, dia tidak bisa berdekatan *gitu*. *Nah*, ketika kita memasukan program itu syaratnya *ndak...ndak* bisa, padahal dia perlu dalam rangka untuk pengembangan wilayah itu, karena tidak bisa lagi desa walaupun pulaunya berdekatan tidak bisa kita samakan antara pulau A dengan pulau B *gitu* ya, lain desa. *Nah*, sehingga sampai kapanpun, kalau seperti itu tidak bisa untuk masukkan program itu di *situ*. Saya kira ini mungkin regulasinya perlu juga dipertimbangkan, supaya ada berkeadilan kepada desa-desa seperti, bahkan ini desa-desa yang seperti ini sebenarnya yang perlu untuk kita perhatikan, karena kan PISEW itukan pengembangan apa ekonomi sosial wilayah, ya. Jadi, saya kira ini Pak Sekjen kaitan dengan itu, saya mungkin ini saja.

Kemudian, terakhir dari Bapak Inspektorat, Inspektorat, Pak, ya? Ya mungkin perlu beberapa evaluasi, ya kita sebenarnya *pengen* juga tahu berkaitan karena masih terjadi juga terhadap keterlambatan-keterlambatan. Saya ada beberapa yang disampaikan di laporan-laporan pekerjaan yang berada di daerah itu, kerjaan dari APBN yang keterlambatan bahkan ada sampai ada satu, ada beberapa tempat, ada satu tempat itu bahkan relatif tidak, tidak dikerjakan, ya, apa tidak dikerjakan. *Nah* ini, tentu ini mungkin laporan-laporan ini perlu menjadi tindak lanjut ke depan supaya apa, program itu supaya bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Jadi, saya kira ini saja terima kasih Pimpinan sekian saya akhiri.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.

KETUA RAPAT:

Baik terakhir sudah selesai semua, Pak Tamanuri terakhir.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Baik, terima kasih, Pak.

**Yang saya hormati Pak Ketua beserta seluruh Anggota Komisi V,
Yang saya banggakan Pak Sekjen,
Pak Irjen,
Pak Kepala Badan, serta
Para Eselon II yang berbahagia.**

Saya tidak banyak-banyak yang saya akan sampaikan, hanya saja menyimpulkan suatu kegalauan ini, karena di setiap instansi itu ada masalah penanganan miskin ekstrem dan *stunting*, *nah* ini di BPIW ini ada juga programnya untuk menurunkan masyarakat yang miskin ekstrem dan *stunting*. Jadi, dalam hal ini saya mengharapkan supaya dapat saya bisa dikasih contoh yang konkrit yang Bapak laksanakan, apa yang Bapak laksanakan untuk mengatasi masyarakat ekstrem kemiskinan dan *stunting* ini. Karena kalau kita lihat, kalau kita bisa raba-raba bahwa itu yang untuk *stunting* itu kan yang mengenai kesehatan, jadi Kementerian Kesehatanlah, kemudian kurang makan, maka dia tidak besar, kesehatannya *nggak* baik kurang makan pisan, *nah*, ini kira-kira itu yang-yang kira-kira yang sangat-sangat berkaitan untuk program *stunting* dan masyarakat miskin, *nah* kalau bapak juga ada program situ, mohon dapat ditunjukkan yang konkretnya.

Kemudian, beberapa waktu yang lalu, di Lampung ada agak viral masalah kontraktor-kontraktor yang alamatnya *nggak* ada, yang kantornya *nggak* ada, kantor alamat kantornya, begitu dilihat bahwa itu rumah-rumah biasa, bukan rumah bukan perkantoran. *Nah*, jadi ini siapa yang salah ya, siapa yang salah ini untuk penentuan pemenang-pemenang tender ini, sampai alamat kantor pun tidak ada, jauhkan yang lain ya, *nah*, ini mohon juga dapat dijelaskan, jangan sampai terjadi, karena setidaknya kalau analisa saya, sebagai orang awam di bidang kontraktor, begitu dia tidak ada alamat kantornya, setidaknya dia, dia bisa menghindar dari jaminan dia selama tiga bulan itu sebagai apa, pemeliharaan, karena begitu dicari *nggak* ada, jadi *nggak* bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu.

Untuk Pak Khalawi, teman saya, sahabat saya ini, saya puji Bapak, dulu sebelum Bapak ini yang sekolahnya sedikit bisa dihitung sama jari, sekarang luar biasa yang banyak, hanya saja tolong ini untuk penempatan, untuk penempatan, jangan biarkan begitu saja. Jadi, sekurang-kurang dia jadi P3K lah *gitu*, kemudian juga harus banyak-banyak bekerjasama juga dengan pemerintah daerah untuk dapat calon-calon yang dikirimkan, sehingga apa

yang dikatakan oleh teman saya tadi yang dari NTB jangan sampai hanya dari Betawi ini *aja* yang banyak, ya, jadi dari daerah-daerah Lampung, saya cuma lihat satu *aja tuh* Lampung tadi subspecialis, cuman satu doang, yang lain *nggak* ada. Nah ini tolong Pak, ini ada kategorinyalah, kalau dari Jakarta nilainya harus 5, dari Lampung 3 cukup, *gitu dong*, soalnya *nggak* bisa bersaing kami luar, di luar, di luar Jawa, ini daya, daya apa, ilmunya dengan kawan-kawan yang ada di pendidikan di Jawa ini. saya rasa demikian makasih, Pak Khalawi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik semua sudah selesai, sekarang bagian Pimpinan, karena Pimpinan cuman satu, jadi Pak Dirjen dan teman-teman, saya akan bawa semuanya mewakili kiri kanan saya yang *nggak* ada, Baik yang pertama.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S. Sos.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua interupsi sedikit boleh, sedikit satu menit?

KETUA RAPAT:

Sudah selesai ini.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Sedikit saja.

Baik ini kemarin di depan menteri saya sudah sampaikan pada kesempatan ini saya sampaikan juga, karena kami sedang ikuti ada badan yang sudah dibentuk di Jakarta sini, entah badan mengatasnamakan badan apapun, tapi kami mohon dukungan dari teman-teman mitra, kalau bisa jangan sentuh Dapil Anggota Komisi V yang ada di sini, ini di seluruh daerah ini banyak kabupaten kota bahkan provinsi yang tidak ada Anggota Komisi V itu banyak, kalau bisa badannya dibentuk itu boleh sentuh di sana, dari program-program yang ada di Komisi V boleh, tapi jangan sentuh di Dapil kami, baik, Pimpinan maupun Anggota Komisi V yang telah menjadi mitranya, kementerian lembaganya menjadi mitra Komisi V, baik Kementerian PU-Pera, Perhubungan maupun juga Kementerian PDT dan Transmigrasi, ini yang sekian kali saya tegaskan lagi, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke makasih. Yang pertama, saya ingin supaya karena kita membahas Evaluasi Penyerapan Anggaran 2023 dan Pendahuluan Anggaran 2024. Pak Sekjen, 2023 saya kira penyerapan anggaran tadi sudah disampaikan baik, kami ingin tingkatkan lagi agar di akhir nanti penyerapan anggaran kalau bisa lebih baik dari yang 2022.

Yang berikut, kita lihat anggaran 2023 dan 2024. Ada penurunan anggaran di 2024, untuk itu saya ingin supaya tolong Pak Sekjen jelaskan dengan penurunan anggaran ini, itu program-program apa saja yang nanti tidak dapat dilakukan, karena kita bicara di sini, ini yang apa yang disampaikan Pak Sekjen anggarannya sekarang 2000...masih Pagu Indikatif ya, itu masih bisa berubah ya. Anggota Dewan di sini Komisi V masih dapat merubah itu, ini baru usulan kementerian pemerintah. Jadi, ini tidak mati ya teman-teman, kami bisa dapat merubah di dalam kementerian yang menjadi mitra kami. Jadi, untuk itu kami minta penjelasan dari Sekjen terhadap penurunan anggaran ini, agar kalau memang itu ada hal-hal yang mengganggu kinerja Sekjen dan berdampak kepada program-program anggota juga, maka kami bisa memperjuangkan untuk mengembalikan atau meningkatkan itu, untuk Sekjen.

Yang berikut, kita bicara tentang hasil evaluasi yang sudah dilakukan, saya kira kita semua kemarin bersama Pak Menteri sudah sepakat bahwa apa yang di...menjadi penilaian BPK terhadap Kementerian PUPR kami sepakat berjalan baik.

Yang berikut Pak Sekjen, ada terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, perlu memastikan rincian lokasi ruas umumnya dan Pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya kira, ini perlu ada satu transparan kepada kami, agar kami sebagai mitra untuk melakukan pengawasan terhadap Kepres ini yang kemarin pernah saya juga sampaikan ke Pak Menteri.

Harapan kami, Pak Sekjen ini menjadi jembatan kita semua ya, harapan kami. Jadi, mungkin kita lihat dengan hadirnya Keppres Nomor 3, ini ada satu terobosan menurut saya di kementerian yaitu mengembangkan satu aplikasi yang baru, SETIA itu, untuk bisa program-program kita semua ada di sana ya, mungkin itu yang kita harapkan bagaimana juga ada satu aplikasi khususlah untuk aspirasi-aspirasi Anggota ini, ada di sana. Jadi, para Anggota tahu betul usulan aspirasinya yang mana yang berjalan ya di tahun 2023, itu sudah apa saja, 2024 apa saja yang sudah masuk. Jadi, itu menjadi satu tolak ukur kinerja para Anggota kita semuanya di daerah kita semuanya.

Jadi saya kira ini sangat kami harapkan bisa ada itu, dan harapan kami yang paling besar tadi saya sampaikan bahwa Sekjenlah sebagai ujung tombak untuk bisa menjaga kinerja kita yang lebih baik bersama dengan kementerian, saya kira itu, tidak perlu kita terlalu ini dengan Pak Menteri, Pak Sekjenlah, saya dulu pernah di komisi lain itu kami selalu sama Sekjen, Sekjen langsung ke para eselon yang lain, jadi Sekjen bisa membawahi semua *gitu* saya kira.

Ya, yang berikut Inspektur Jenderal, ini sebenarnya Inspektur Jenderal ini yang perlu mendapat saya kira harapan kita semua untuk bisa memperbaiki kinerja-kinerja yang yang kita semua selama ini selalu menyampaikan di sini, tapi saya lihat menurut kami ya, Inspektur Jenderal belum bisa maksimal untuk melakukan tugasnya, ya. Ini di dalam paparan tadi Inspektur Jenderal mengalami kenaikan, ya, walaupun cuman kecil, tetapi harapan kami dengan kenaikan ini apa, bisa lebih baik, dan pertanyaan yang sama tadi saya sampaikan bahwa dengan peningkatan ini apa, Pak, jaminan kepada kita bahwa kinerja yang akan Bapak lakukan ke depan ya, dengan penambahan anggaran ini, itu menjadi pertanyaan kami.

Yang berikut, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Suryadi terhadap temuan-temuan, saya kira ini justru itu, tadi saya singgung masalah kinerja, agar tidak lagi terdapat temuan yang seperti tadi sudah disampaikan, yang bisa ada temuan berulang-ulang kali, ini Pak Irjen, Pak Inspektur Jenderal harus bisa memberikan kita jaminan bahwa ini tidak akan terjadi ya ke depan, karena terus terang ya, kinerja Bapak adalah kinerja kita semua, menjadi tanggung jawab kita, karena kita mitra.

Yang berikut, Pak, saya kira Pak Inspektur Jenderal ini tolong kita harus membangun kerja sama, jaminan kita harus bisa setiap kita juga melakukan pengawasan ke daerah, temuan-temuan yang kami dapat kami harus bisa ditindaklanjuti, dan memberikan laporan ke kami. Karena masih banyak tadi teman-teman sampaikan, terakhir Pak Sigit sampaikan di daerahnya ada temuan proyek yang meninggalkan segala macam, jangan cuman kami sampaikan di sini selesai Pak, kami ingin itu dicatat dan ditindak lanjuti Pak, dan Bapak tolong sampaikan kepada kita, apa hasil temuan setelah kami sampaikan itu, maka itu ada penyelesaian, seperti kami sampaikan kemarin di tempat kami, ada kejadian proyek yang terbengkalai seperti ini-ini, tolong ditindaklanjuti Pak, kalau Bapak sampaikan anggaran kami terbatas, Bapak sampaikan itu, demi kelancaran pengawasan, kami akan tambahkan anggaran untuk (*suara kurang jelas*), karena itu perlu pengawasan, kalau berulang terus terjadi, maka kinerja kita semua ini tidak ada apa-apanya.

Masyarakat yang tadi mengharapkan mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan, itu tidak mendapatkan seperti apa yang kita harapkan, ya, preservasi jalan, aspalnya *nggak* sampai setahun hancur ya kan. Saya kira hal-hal ini yang perlu mungkin kami minta kepada Inspektur Jenderal untuk tugas utamanya itu, melakukan pengawasan itu saya kira, ya kan, untuk memperbaiki ke dalam Pak, memperbaiki ke dalam, ya kan. Dengan melihat ketidakwajaran di ujungnya BP2JK, maka itulah jawaban dari Bapak, hasil pemeriksaan Bapak itu untuk kami bisa mengevaluasi, kenapa ini semua, Bapak harus menyampaikan itu ke kita, maka itu menjadi dasar untuk bisa mengembalikan atau membuat sistem baru untuk menjaga itu ya kan, karena ini bukan sekali dua kali, Pak, *udah* bertahun-tahun ini berjalan terus kejadian-kejadian ini iya kan, dan ini merusak kualitas pembangunan kita infrastruktur, khususnya infrastruktur yang di bawah kita semua.

Jadi, kalau kita bilang gagal, saya bilang gagal Bapak dan jajaran, karena tidak melakukan pengawasan, ya kan, bina konstruksi dilakukan karena

memakai kacamata kuda ini yang termurah yang kita lakukan, untuk menjawab itu semua Bapaklah yang harus bisa menjawab, akibat itu, ini hancur, maka itu harus diubah. Karena kalau kami bicara terus di sini percuma Pak, Bapaklah yang bisa harus membuat rekomendasi-rekomendasi di rapat-rapat dengan Anggota, Bapak sampaikan itu, betul hasil penemuan Inspektur Jenderal bahwa akibat dari ini, inilah semua yang terjadi.

Untuk itu, sekarang kami membahas anggaran 2024, ya kan, Bapak naik satu miliar, naik ratusan miliar pun kami bisa usahakan itu, yang penting komitmen Bapak untuk bisa melakukan pengawasan yang betul-betul yang ingin kita, saya hari ini mimpin di sini, Pak, itu yang saya ingin bahwa, hari ini kami harus bisa, Bapak yakinkan kita, karena anggaran yang sekarang kami bicarakan untuk 2024 baru awal, maka kita ingin kinerja semuanya ke depan, hasil daripada apa yang kita putuskan nanti itu bisa terawasi dengan baik ya, itu adalah tugas Bapak.

Karena saya sudah capek berteriak di daerah saya, mangkrak, saya bilang, kalau di daerah satu saja Pak, dari lima cuman jalan, yang berhasil cuman satu Pak, empat bermasalah, itu baru satu Pak, tapi hasilnya Pak, yang saya sampaikan itu tidak ada tindak lanjut dari Inspektur Jenderal, betul Pak Roberth, kemarin kita tengok di sana terjadi pemutusan kontrak karena apa, ini ini ini, ya memang pengusaha dari luar, semua tadi berteriak itu, bagaimana itu Sekjen juga menyampaikan bahwa, bagaimana caranya supaya kami ini, mari kita Bapak-bapak pikirkan itu, solusinya seperti apa, supaya tidak ada lagi rental perusahaan, yang tadi Pak Tamanuri sampaikan dicek ke sana, *nggak* ada itu rumah kosong, data fiktif alamat perusahaan, memang sengaja dibuat itu, Pak. Jadi, kalau proyek tidak sanggup ditinggalkan, dia tidak ada lagi. *Nah*, ini tidak boleh terjadi Pak, tidak boleh terjadi ya kan.

Makanya saya kenapa *stress* di sini, karena kami baru awal membicarakan anggaran 2024, marilah kita bicara dulu komitmen kita untuk bagaimana kita memperbaiki semua ya kan, kalau memang itu Bapak sampaikan, yakinkan kita, kita akan menambah anggarannya untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi keluhan semua, bukan cuman kami Anggota, tapi keluhan pengusaha-pengusaha lokal di daerah. Demikian pun, Pak, saya ingin juga kepada BPSDM dan lain, bahwa ini banyak juga syarat-syarat yang dibuat menyusahkan daerah, Pak, pengusaha daerah itu tidak sanggup, harus ikut ini, ikuti itu syaratnya ini, dan ini memang diberatkan *gitu*, sengaja dibuat itu ya kan, supaya pengusaha daerah tidak mampu untuk itu, karena mereka terbatas punya jalur komunikasi-komunikasi untuk bisa mendapatkan apa yang disyaratkan *gitu*.

Hal-hal ini yang perlu kita perbaiki semuanya, bukan kita selalu berbicara, tapi solusinya apa untuk kita ya, supaya ini kita. Saya kira sekarang ada pakai sistem baru yang dibuat itu ya kan, pakai e-katalog, ini saya kira sistemnya cukup baik ya, kemarin saya *ngecek* ada beberapa yang sudah dilakukan itu, ini hal berjalan baik, karena memang wajar nilai kontraknya dan yang mendapat itu memang punya kelengkapannya lengkap, karena sebelum mereka ikut di dalam itu ada verifikasi alat di sana sama dari tempat balai dan sebagainya, dan itu yang benar dilakukan itu. Kalaupun itu mau dibuka tetapi

yang masuk itu harus verifikasi lapangan alat kelengkapan alatnya, tidak ada, gugurkan, bukan kelengkapan suratnya, Pak, yang dilakukan sekarang surat saja yang membuat patokan, dan itu yang membuat semua kegaduhan di daerah-daerah kita semua.

Jadi, saya mohon maaf saya harus *ngomong* ini karena kesempatan saya sebagai Pimpinan hari ini saya sampaikan semuanya, agar kita bisa merubah itu ke depan, agar betul-betul tugas Pak Inspektur Jenderal ya itu sebagai Inspektur, Bapak, jenderal di sini ya, yang lain sekretaris ya kan, tapi masih sekretaris, Bapak, Inspektur, kalau polisi, Inspektur. Inspektur Jenderal itu pangkatnya apa *tuh* Pak, berapa bintang itu ya kan, Bapak yang pakai bintang di sini, kenapa, ya memang Bapak tugasnya untuk mengawasi semuanya *gitu*. Saya harapkan itu, Pak, ya untuk Pak Inspektur Jenderal.

Baik saya lanjut ke Pak BPSDM, saya harus *ngomong* juga banyak ini. Saya sepakat lihat tadi banyak program untuk peningkatan sumber daya manusia ke dalam maupun keluar saya sepakat itu, tapi ada beberapa hal yang saya mau lihat ini bahwa berarti ada kecenderungan, kecenderungan bahwa ASN kita ini kebangsaannya belum begitu baik, sampai ada latihan bela negara dan sebagainya dari sana, kalau disiplin saya sepakat harus dilakukan itu, dan tadi Bapak sampaikan, saya melihat di paparan itu ada PPK Satker, harus ikut wajib itu, saya kira itu kami dukung bahwa dilakukan itu, sekaligus Pak, harus juga dari KPK untuk memberikan wawasan terhadap pencegahan, ini perlu, perlu dan karena mereka bersinggungan langsung dengan pelaku-pelaku di daerah, maka mereka pun harus di-*protect*, ya, ya karena suksesnya kualitasnya pembangunan itu ada di tangan mereka, karena mereka yang kontrol di sana ya kan, maka itu mereka pun harus dikontrol.

Bagaimana caranya untuk bisa dikontrol saya kira kerja sama antara BPSDM dan Inspektur Jenderal perlu untuk bisa melakukan satu sistem untuk bisa mengontrol teman-teman yang nanti diangkat fungsi sebagai Satker, PPK dan sebagainya ya. Karena itu, ya tadi juga disampaikan terhadap bagaimana Pokja, LPU, Pokja-Pokja ini yang selalu, maka itu tidak bisa harus segera di-*rolling* Pokja-Pokja, mungkin itu Pak Ketua BP2JK juga harus selalu dievaluasi, bukan ini belum waktu diganti, mungkin berapa bulan harus evaluasi, agar mereka tahu bahwa kinerjanya dievaluasi setiap saat dan setiap saat bisa diganti, kalau *nggak*, dia, sesuai waktu untuk evaluasi dua tahun atau setahun, maka dia nanti waktunya baru dia sudah dekat-dekat dia berbuat ya. Jadi, saya kira setiap saat itu bisa dievaluasi, maka setiap saat bisa diadakan pergantian itu yang paling penting menurut saya.

Jadi dan berikutnya saya kira saya setuju dan saya sangat mendukung Pak Khalawi untuk pengiriman anak-anak kita, bangsa kita keluar, kita lihat dulu Pak Habibie banyak kirim untuk insinyur-insinyur kita belajar di luar negeri, hasilnya saya kira cukup memuaskan kita, banyak, dan saya kira di tenaga konstruksi kita juga harus punya itu, maka ini harapan kami ada di tangan Pak Khalawi. Yang...untuk di dalam negeri, saya kira sudah banyak juga tapi ke luar negeri itu paling sangat penting, Pak Khalawi, ya kan, jangan terlalu bikin banyak latihan tentara-tentaraan *tuh*, Pak, itu bikinlah anggaran itu lebih

diperbanyak untuk pendidikan, terutama keahlian kita di bidang infrastruktur yang bisa setaraf internasional, itu yang perlu banyak kita hasilkan.

Yang berikut, saya kira saya ke BPIW, ini Badan Pengembangan Sumber Daya, eh Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Saya tadinya Pak, terus terang saya pikir, Bapak ini pengembangan pegang pelaku, ternyata Bapak kan cuman perencanaan ya kan, ya jadi sebenarnya harusnya bukan pengembangan harusnya perencanaan infrastruktur atau badan perencanaan pengembangan infrastruktur, itu lebih pantas menurut saya, tadi saya berdiskusi sama Pak Ridwan ya kan, Badan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur ya. Pak, saya waktu pimpin Kunjungan Kerja ke Papua dari tempat Bapak yang mewakili untuk daerah Papua, saya minta di beliau sampaikan nanti akan berikan ke saya, terhadap perencanaan infrastruktur di Papua seperti apa, tolong saya diberikan.

Dan, mungkin juga untuk teman-teman di Komisi V untuk bisa nanti minta seperti apa di pengembangan perencanaan pengembangan. Karena itulah menjadi dasar perencanaan di kementerian, begitu Pak Sekjen ya, berdasarkan ini ya, ya kan, jadi tidak *ujug-ujug* ya kan, bikin ini bikin ini tapi ada perencanaan besarnya yang dibuat, dan itulah menjadi patokan kerja, maka kami pun harus tahu itu menurut saya, Anggota Dewan juga harus memegang perencanaan yang ada, agar kami *tau* dan usulan-usulan kita untuk daerah kita bisa mengacu kepada apa yang ada, dan apa yang perlu kami juga memberikan masukan kepada BPIW untuk menjadi rencana perencanaan infrastruktur di daerah kami, hal-hal apa yang perlu. Saya kira ini juga saya minta kerja sama Pak, ya, Kepala BPIW untuk bisa berkomunikasi dengan kami juga ya, teman-teman Anggota Dewan untuk apa, perencanaan yang sudah Bapak lakukan di daerah kami begitu.

Jadi, ini dan saya kira ya itu Bapak perlu juga kan peningkatan anggaran untuk, karena, apalagi perencanaan di daerah kami di daerah-daerah pelosok terluar, tertinggal, itu perlu biaya yang tinggi, Pak, untuk sampai ke sana ya kan, untuk melihat di sana, karena Bapak tidak mungkin menghayal untuk buat perencanaan di daerah, betul kan, harus hadir di sana, ya. Karena saya pernah menemukan itu dulu perencanaan yang dibuat oleh Bappenas untuk daerah kami di sana, begitu sampai di sana bingung pengusaha, *wah* naik sampan, naik ini, dia kira enak seperti di Jawa Pak, kenapa, mereka *nggak* tahu daerahnya, jadi dia menghayal saja buat perencanaannya, begitu sampai di sana baru tahu daerahnya seperti ini, karena dia tidak sampai di sana ya kan *gitu*. Nah, itu saya pernah juga menyampaikan waktu kami rapat di Banggar bahas seperti ini, Presiden itu datang, makanya dia tahu bagaimana harganya di sana sekian, teman-teman yang di sini tidak pernah buat perencanaan terhadap pembangunan Papua itu hadir sampai ke sana, jadi tidak mengerti.

Saya kira ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian, Pak Sekjen dan seluruh jajaran, tadi banyak sudah disampaikan, kami dapat menerima selaku Pimpinan, nanti di putusan akhir, tapi yang ingin saya sampaikan tadi, harapan kami pas Inspektur Jenderal bisa menjadi satu alat untuk memperbaiki yang tadi saya sampaikan dan saya ingin kerja sama kita, Pak, apa yang kami dapat temuan, kami sampaikan, Bapak tolong tindak lanjuti itu, Pak, tolong tindak

lanjutin saya ingin tadi itu, selama ini kami sampaikan, ini Bapak ya cuma mendengar mencatat saja Pak.

Bagi saya ini, bahwa apa yang juga kami sampaikan di depan Pak Menteri itu, Bapak juga akan hadir, Bapak bisa untuk itu, dan kami kalau rapat lagi itu bisa disampaikan bahwa, apa yang kami sampaikan itu sudah ditindaklanjuti bahwa benar salah bilang salah, benar bilang benar, agar kita bersama-sama bisa memperbaiki semuanya Pak, ya kan. Karena ada juga Anggota yang cuma dapat *hoax* terus langsung disampaikan, padahal di sana *nggak* benar gitu. Jadi kami juga harus bisa terbuka untuk menerima itu, kalau memang itu tidak benar, ya Bapak harus sampaikan tidak benar, dan itu menjadi kontrol untuk kita juga, *gitu*.

Saya kira itu yang selaku unsur Pimpinan, saya kira karena ini sudah selesai nanti jam 2 kita akan lanjut. Jadi, Pak Sekjen bisa nanti teman-teman bisa menjawab *highlight*-nya saja yang detail nanti secara tertulis ya, bisa singkat saja, saya persilakan Pak Sekjen dan jajaran untuk menjawab.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

**Terima kasih banyak Pimpinan,
Wakil Ketua,
para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Terima kasih banyak, masukan tadi dan beberapa catatan tentunya akan menjadi perhatian kami bersama, termasuk tadi ada empat hal yang disampaikan di pengantar untuk peningkatan, empat peningkatan baik koordinasi, pengawasan, kualitas SDM, dan keterpaduan. Ada beberapa hal mungkin tidak banyak, yang menyangkut persyaratan program ini nih yang memang ada tanggung jawab di kesetjanaan untuk nanti kami bahas bersama, karena memang ada beberapa masukan yang terkait.

Yang pertama adalah tentang persyaratan program, Pak, mohon maaf Pak, persyaratan program ini memang tanggung jawab di kami nanti kami bahas kembali dengan para Dirjen, ada beberapa masukan bagaimana mengintegrasikan program, jangan sampai ada segregasi yang masing-masing berjalan sendiri, termasuk juga aplikasi atau implementasi program di lapangan yang perlu penyesuaian dengan kondisi lapangan. Terima kasih banyak juga terkait dengan masukan untuk luar Dapil, *alhamdulillah* kemarin sudah diselesaikan oleh Pimpinan dan Pak Menteri sudah putuskan, tentu kami, tugas kami untuk menjaga agar teman-teman masing-masing unit organisasi menjalankan apa yang sudah kemarin diputuskan bersama.

Kemudian terkait dengan aspirasi, terima kasih banyak Pak Djadi, kami akan sediakan karena memang di salah satu pusat di tempat kami adalah pusat fasilitasi infrastruktur daerah, jadi kita akan jaga agar tidak ada *overlap*, daftarnya sangat terbuka nanti jika diperlukan mungkin kami akan *share*, tadi yang jelas Pak Djadi sudah menyampaikan bahwa itu memang diperlukan, tentu ke Pak Djadi nanti kami sampaikan, Pak.

Dan, ini satu tapi menurut kami ini sangat penting untuk kami laporkan, memang ditemukan, tindak lanjut temuan apa, laporan hasil pemeriksaan rekomendasi, Hasil Pemeriksaan BPK, kami bahu-membahu dengan Pak Irjen, tentu dengan para Pimpinan Direktorat Jenderal dan Badan, cara kami untuk mempercepat tindak lanjut ini dengan cara ada seperti *clearing*. Jadi, mereka-mereka yang masih punya tanggungan temuan, tidak akan diangkat, jadi di-*profiling*, di-*profiling* oleh Irjen, dan *alhamdulillah* ini kami mendapatkan informasi dari BPK ini dijadikan contoh untuk kementerian yang lain, tapi dengan cara seperti ini, *alhamdulillah* Pak, dengan dua tahun terakhir ini sudah meningkat dari hampir 50% sekarang sudah *insya Allah* ke 80%, jadi setahun 15%. *Nah*, tentu ini dapat kami lakukan apalagi tadi Pak Pimpinan secara khusus untuk apa, menindaklanjuti saran-saran dan temuan yang ada di lapangan.

Mungkin tadi mohon maaf karena ini menyangkut juga ada tadi Pak, yang aspal karet, aspal dan karet memang ada kebijakan, saya tadi sudah konfirmasi ke dirjenya, stok karet kita itu memang masih banyak Pak, ini yang, tetapi kembali nanti barang kali ada pembicaraan detail nanti dengan Dirjen Bina Marga karena itu memang stoknya ada di Bina Marga, tentu kalau ada pertimbangan yang lain yang diputuskan di forum ini, *insya Allah* kami juga akan mengikuti.

Menambahkan tadi saya tidak elok juga kalau biarkan Pak Yudha mendapatkan pertanyaan, kenapa kami harus dengan BKKBN tidak dengan Kemendes dan yang lain-lain, ini lebih pada data, Pak. Jadi, keputusan data mana yang akan digunakan itu udah diputuskan melalui keputusan Menko PMK yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan kegiatan PKE. Jadi, keputusan bersama tentu banyak pertimbangan, yang lebih lengkap memang yang di BKKBN, cakupannya, Pak, jadi cakupannya.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Iya, BKKBN datanya, data personal miskin ekstrem ya kan, *nah* yang saya maksud di Kemendes itu adalah data desanya, bukan personalnya, tapi desa mana yang memang konektivitasnya belum terbangun, itu yang saya maksud Pak, kan di Kemendes itu ada kan desa sangat tertinggal. *Nah*, apa faktor yang membuat desa ini sangat tertinggal, *nah* faktor utama di antaranya itu kan infrastruktur, maksudnya jalan misalnya atau jembatan seperti yang saya sampaikan tadi. *Nah*, maka kita tidak menolak BKKBN-nya, Pak, tapi alangkah baiknya Kementerian Desa dilibatkan, karena ketika kita rapat dengan Kementerian Desa bahasanya begitu.

KETUA RAPAT:

Ya-ya, saya kira Pak Sekjen, jadi tadi yang dimaksud Pak Syahrul itu, memang saya juga sepakat bahwa ada juga Kemendes, karena itu di tupoksi kami juga di sini, agar ini bisa klop *gitu*. Jadi, bukan kita masuk kepada *person-nya*, *by name*, *by address*, tapi juga desa juga, jadi supaya ini juga klop bahwa

desa yang tertinggal juga bisa kita tingkatkan dengan program-program, saya kira itu.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Terima kasih, Bapak. Jadi, nanti mungkin kami izin melaporkan juga bahwa dalam penyelenggaraan Impres yang terkait.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya interupsi, Pak. Sepanjang yang saya ketahui, Kementerian PU itu dapat data dari BKKBN, itu *aja*, kan pendukung, bukan aktor, jadi mohon maaf jangan dianggap aktor, tapi pendukung dapat data ini. Lalu infrastruktur apa yang bisa dibantukan oleh desa tersebut, sehingga desa itu terangkat dari desa miskin absolut, terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Terima kasih, Bapak. Jadi, izin melaporkan menambahkan bahwa Kementerian Desa PDTT, juga termasuk kementerian lembaga yang memang ditugaskan untuk menjalankan PKE ini, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator PMK. Terima kasih, Pak, mungkin itu dari kami.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Sedikit supaya lebih konkret, Pak. Berharap nanti kan saya katakan tadi bahwasanya harus antara Kementerian PU dan Kementerian Desa ini memang butuh klop, karena begini, Pak. Kami, ketika membaca di Kementerian PU ini programnya, itu kami tidak melihat itu memberikan apa namanya...kan Kementerian Desa bukan aktornya, Kementerian Desa tidak pembangunan, walaupun namanya adalah pembangunan desa *gitu* ya, tetapi pada kenyataannya itu tidak begitu besar anggarannya, jadi tidak bisa cukup oleh Kementerian Desa, maka oleh karena itu kita berharap ini atas dasar rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian Desa itulah, salah satu kebijakan distribusi anggarannya, saya tanya Pak, contohnya kementerian, desa sangat tertinggal, siapa yang melakukan ini, siapa yang akan menyelesaikan ini, katanya ini semuanya kan perlu harus jelas siapa yang melakukannya, terutama dalam hal pembangunan infrastrukturnya Kementerian PU yang harus masuk, begitu maksud saya.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira ya, jadi kita bicara siapa-siapa, ujungnya cuman satu pemerintah, pemerintah siapa ya mungkin ini semuanya. Karena di bawah Menko ya itu, tadi sudah disampaikan, Pak, ini, ya silakan Pak Irjen.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Baik terima kasih, Bapak Pimpinan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan contoh yang ditanyakan oleh Pak Suryadi tadi masalah temuan yang berulang, biasanya itu kegiatan yang berulang audit yang kegiatan MYC Pak, jadi kegiatan melebihi 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, begitu audit kalimat itu akan muncul terus, jadi kalimat terbawa akibat tindak lanjut.

Terus yang kedua, didasari kepada pos mata anggaran terhadap belanja yang tidak tepat, dulu iya Pak, tapi sekarang 2 tahun terakhir *udah*, sudah sinkron ini khusus kegiatan yang diserahterimakan kepada pihak ketiga, harusnya dia dibelanja barang tetapi tertera di belanja modal. *Nah*, ini sudah disesuaikan sudah ada PMK-nya dan sudah diselaraskan, dulu pada masa dulu diikat, Pak, persentase berapa belanja pegawai, berapa belanja barang dan sisanya harus belanja modal, tapi dengan kondisi tidak mengikat itu, proporsional kegiatan belanja barang sesuai dengan belanjanya, Pak. Jadi, ini yang kegiatan diserahkan ke pihak ketiga.

Terus selanjutnya, untuk aset-aset tadi Pak Suryadi tadi sudah saya diskusikan dengan Pak Sekjen, rangka jembatan misalnya, ini bisa dihibah Pak, bisa dilelang atau kan bisa difungsikan, kalau memangnya materialnya masih sesuai, Pak, itu mungkin informasi Pak Suryadi.

Terus untuk yang Pak Sigit, Pak, mohon maaf kalau nanti keliru, ini informasi terhadap rusun di Larantuka di Keuskupan, itu kegiatan 2021 sudah di PHO, Pak, di bulan Agustus 2022, kalau memangnya yang dimaksudkan pembangunan Rusun Keuskupan Larantuka, itu sudah di PHO di 2022 di bulan Agustus. Untuk kondisi yang informasi banyak apa...vendor-vendor yang Subkon yang belum dilunasi, ini informasi terakhir kami dapatkan juga sudah tuntas Pak, *gitu* Pak, di bulan Februari kemarin sudah tuntas, Pak. Jadi, kalau memang yang disampaikan Pak Sigit persis sama dengan pembangunan Rusun Keuskupan, makasih Pak, selanjutnya untuk...

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Boleh, lewat Ketua?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Informasi baru sepekan kemarin ketika saya berkunjung ke Labuan Bajo, Pak. Jadi kalau rusunnya sudah bagus, tetapi sebelum peresmian apa, ya sebelum peresmian kondisinya sangat tidak layak, terus apa namanya...untuk vendor itu informasi baru sepekan kemarin, yang cerita vendornya, Pak, yang cerita vendornya belum dibayar. Saya kira mungkin ini *anu aja* ya *second opinion*, pembanding saja, artinya laporan dari Bapak syukur

kami bisa dapat tembusannya, nanti kami akan berikan tembusan dari laporan dari kami yang ada di lapangan, terima kasih, Pak Irjen.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Baik kami tambahkan memang beberapa waktu yang lalu ada kerusakan akibat Badai Seroja, Pak, jadi *udah* diperbaiki, jadi akibat badai juga ada kerusakan sudah diperbaiki kerusakan tersebut dengan kegiatan rehabilitasi Pak. Nanti akan kami cek lagi yang seperti Pak Sigit sampaikan.

Selanjutnya, mungkin yang disampaikan lagi oleh Bapak Pimpinan, apa, terhadap kegiatan beberapa, izin Bapak, mungkin pada saat itu kami sudah melaporkan secara lisan untuk informasi yang Bapak Pimpinan sampaikan untuk kegiatan 5 ruas kegiatan atau 4 ruas yang ada di Yapen, Pak. Dan, kami sudah melaporkan seingat kami secara lisan pada saat agenda juga di sini Rapat Dengar Pendapat, itu contoh misalnya untuk yang ada di Yapen untuk jembatan Makrowen, Pak, itu putus kontrak pada satu dan itu seingat kami sudah kami laporkan ke Bapak Pimpinan, jembatan Yoram sudah selesai Pak, terus untuk paket preservasi jalan ruas Serui Menawi sudah selesai, namun ruas jalan Menawi Sobeba itu kita putus kontrak.

Karena kenapa pada saat itu kita putus kontrak, hasil konsultasi kami juga dengan Bapak Pimpinan tidak memperpanjang waktu pelaksanaan, jadi kami putus kontrak, Pak. Mungkin itu sekedar informasi, Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi kita berkomitmen Pak untuk membantu kondisi untuk mengelola atau memperbaiki tata kelola ke depan, mungkin itu Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih, saya tambah sedikit, Pak. Jadi, apa yang Bapak sampaikan saya hadir di sana, betul, satu sudah selesai apa adanya, dan yang satu lagi ini yang ingin kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang itu yang harus menjadi temuan-temuan di dalam pemeriksaan. Bagaimana jalan yang satu itu putus, memang karena vendornya itu satu orang yang dapatnya paket itu, perusahaan boleh beda tapi biangnya satu, makanya satu dikorbanin, tetapi anggarannya dihabisin, harusnya proyek anggaran yang utama adalah preservasi pengaspalan, tetapi diambil yang *second*, yang kedua adalah pembuat gorong-gorong dan sebagainya, itu yang diperbanyak itu yang dibuat semuanya, karena mengejar bisa kerserap anggaran *gitu* ya kan, ini hal-hal seperti ini yang menjadi kami ingin supaya ada perhatian.

Satu lagi Tanggul, itu di Abukare, itu kontrak 21 kalau *nggak* salah, yang dikerjakan cuman, cuman 80 meter Pak, 80 itu anggarannya 9 miliaran, Pak, padahal kontraknya dia, itu kalau tidak salah, 400 apa ratusan meter, kontrak yang harus diselesaikan, tetapi dikerjakan dan itu saya hadir disana, saya lihat dan saya semua sudah bikin dokumentasi, cuman ya ini saya ingin supaya hal-hal seperti ini inilah tugas Inspektur Jenderal untuk melihat kualitasnya, iya kan. Jamin saya itu kalau dibongkar, itu yang namanya dipasang sesuai ketentuan-ketentuan itu, itu tidak dilakukan, karena dokumentasi dikasih sama

masyarakat, kerjanya cuman pakai mobil ukuran segini, bagaimana bisa selesai Pak dengan secepat, ini semua dalamnya kosong, Pak, begitu. *Nah*, hal-hal seperti ini-ini saya ingin supaya ya kita saling kontrol, Pak.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Itu maaf Bapak, tanggul di mana tadi, Pak?

KETUA RAPAT:

Di Abukare, Pak

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Abukare Yapen?

KETUA RAPAT:

Itu pun putus, ya yang di Yapen, yang tadi saya bilang proyeknya, itu pun putus gitu iya kan, sanggup dikejar cuma sekian saja selesai. *Nah*, sekarang yang baru sudah di apa...kontrak baru lagi masuk, ya mudah-mudahan ini bisa berjalan, tapi yang lama, ya kontraktornya cuman sanggup segitu ya kan. Jadi, hal-hal ini yang perlu mungkin menjadi perhatian bahwa, ada yang memang sengaja nanti akan putus, dan inilah yang menjadi fokus kita, tawar serendah mungkin, ya kerja, ambil untung, terus putus, biarkan.

Karena kalau habis dia rugi, bagaimana itu supaya dia ambil saja, bisa dapat untung, putus, *nggak* apa-apa, modus ini yang perlu mendapat perhatian Pak, ini modus Pak, memang sudah dibuat seperti itu. Jadi, di mana yang harus diselesaikan tapi di mana nanti dia putus, tapi dia sudah ambil keuntungannya Pak, jadi putus pun dia sudah menarik keuntungan ya, kan karena kalau sampai dia lakukan selesai, dia tidak akan untung, dengan hitung-hitungannya ada *gitu*. Hal ini yang perlu mendapat perhatian, Pak Inspektur Jenderal, ini untuk masukan, Pak ya, saya kira itu, Pak.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Baik terima kasih, Bapak Pimpinan. Nanti ini yang terutama seperti tanggul Pak, informasi baru, tanggul Abukare di Yapen, kami akan audit, apalagi yang Pak Pimpinan katakan nilai kontrak lebih 400 miliar, Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak, Pak, panjang itu sebenarnya.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

400 meter.

KETUA RAPAT:

Iya dia kontraknya itu sebenarnya 21.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Dikerjakan 80 meter, baik Bapak.

KETUA RAPAT:

Yang di kerjakan cuman ini, karena memang tidak pasti tidak akan selesai Pak, sanggupnya, itu yang saya sampaikan. Maka, dia kesanggupannya cuman segitu, tapi bagaimana nanti sampai diputus, dia tidak rugi, Pak, pasti dia untung, karena kalau dia selesaikan di ujung, selesai, dia rugi, Pak. Jadi, itulah yang saya bilang, ini sudah memang direncanakan, jadi bagaimana mereka menawar serendah-rendahnya, tetapi ujungnya dia putus hubungan, tetapi dia tidak rugi, Pak, dia tidak rugi, karena dia sudah bermain di sini, Pak. Jadi, putus tetap dia untung gitu, walaupun ada jaminan segala, itu itu, ini supaya masukan, Pak, karena ini modus yang dilakukan selama ini, ini menjadi temuan kami, dan ini saya sampaikan kepada Pak Inspektur Jenderal untuk menjadi perhatian untuk bisa menjadi bahan untuk itu, makasih.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Izin Bapak, kami tambahkan apabila kontrak itu diputuskan, otomatis *blacklist*, Pak, dan jaminan pelaksanaan disita untuk negara, itu prinsip daripada pelaksanaan kontrak. Baik Bapak, kami akan coba menindaklanjuti dan terus mengawal apa yang Bapak Pimpinan sampaikan, terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Khalawi, kita singkat saja Pak, ya, *nggak* usah ini, ya.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M.):

Terima kasih atas *support* dan dukung apa masukannya dari Pimpinan dan Anggota Komisi V, cuma satu mungkin dari Pak Suryadi dan Pak Tamanuri ya. Untuk Program Magister Super Spesialis ini memang tidak semua perguruan tinggi mempunyai prodinya, ini program khususnya, hanya ada di PU. Jadi bukan spesialis tapi super spesialis Pak, contohnya ini satu prodinya adalah preservasi jalan pada kondisi geoteknik tanah sulit itu, jadi bukan...apa, spesialis ahli jalan misalnya itu banyak, memang ini yang ada hanya di perguruan tinggi yang besar-besar ini yang bisa mengadakan UGM, ITB, Undip, dan ITS. Namun untuk penyebarannya sesuai dengan kebutuhan, tadi usulan daripada balai yang mengirimkan.

Jadi, mungkin NTB ada 7 atau eh Lampung tujuh, NTB dua itu karena memang bukan berarti sana tenaga ahlinya kurang, tapi sudah ada, cuman itu yang dikirim kembali yang ikut kuliah lagi cuman dua orang itu, Pak, mungkin

kalau analisis kebutuhan apa SDM itu sudah dihitung, jadinya mustinya ahli di bidang SDA-nya berapa itu sudah ada, memilih yang ikut, yang ikut dikirim apa program ini adalah hanya dua orang itu Pak Suryadi. Namun demikian kami akan coba untuk bisa penyebaran Karya Siswanya lebih banyak, khususnya wilayah timur, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau Pak Khalawi pasti semuanya setuju, Pak Khalawi. Itulah kalau berkomunikasi baik ya kan, jadi itu kalau kita bisa berkomunikasi ya, kita saling tahu bahwa pasti apa yang kita sampaikan dan apa yang mau disampaikan, mau dilakukan pasti ada komunikasi ya. Saya lanjut ke Pak Yudha, Pak Yudha ini baru, makanya masih raba-raba pasti, tapi silakan saja.

KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Makasih, Pimpinan.

Saya ini merespon yang disampaikan Pak Suhartono dari Jawa Timur, kaitannya dengan Selingkar Wilis, Pak. Memang ini BPIW ketika dibentuk tahun 2015, ini sebetulnya sudah masuk dalam arahan pengembangan dari program, jadi ini untuk kegiatan Selingkar Wilis ini sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 untuk ditangani Kementerian PUPR dan jalan *ring* tersebut juga sudah diusulkan menjadi jalan nasional dan sektor yang masuk di dalam kegiatan ini ada dari Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Untuk Sumber Daya Air, ini pembangunan jaringan irigasi permukaan di DI Bendo, Di Sumantok, dan juga DI Tugu yaitu di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ponorogo. Sementara untuk program Bina Marga berupa pelebaran jalan untuk penambahan lajur di ruas Durenan Prigi, sementara untuk Cipta Karya salah satunya adalah pengembangan SPAM dan pengembangan sistem pengolahan persampahan skala regional. Jadi, di sini untuk di Kediri, Nganjuk, dan Madiun, Tulungagung, dan Ponorogo, sementara untuk SPAM itu juga sama di Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Kabupaten Jombang.

Kemudian, untuk yang disampaikan Pak Syahrul Aidi kaitannya dengan data, ini, Pak, data kalau sesuai dengan untuk PKR, PKE ini kami memakai data yang kriteria sesuai dekat dengan Kementerian PUPR itu adalah yang didapat dari BKKBN, dan itu dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Menko PMK. *Nah*, untuk data yang lain ini keterlibatan di PKE ini banyak sekali Pak, kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu Dukcapil dan juga dari Kemendes PDTT untuk kaitannya bantuan pemanfaatan dana desa.

Namun yang selaras dengan tusi Kementerian PUPR sekaligus yang menjawab Pak Tamanuri, ada 3 strategi yaitu dalam pendekatan PKE ini adalah menurunkan beban pengeluaran, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga adalah pengurangan...pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Sehingga dari data-data itu intervensi yang dapat dilakukan

program dari Kementerian PUPR adalah dengan memberikan bantuan Perumahan Swadaya BSPS, kemudian Pamsimas yang paling dekat. Jadi, penyediaan air minum, dan juga yang ketiga perbaikan lingkungan yaitu dengan sanitasi dan drainase. Ini semua, semua program dari Kementerian K/L dan pemerintah daerah, tentunya akan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK untuk menjadi konvergensi program, jadi semua program termasuk mungkin konektivitasnya nanti di antara desa itu, entah itu melalui PISEW ataupun dana-dana yang ada di kabupaten dan kota. Sehingga, untuk pengentasan kemiskinan ekstrem ini, kolaborasi dari beberapa kementerian ataupun K/L dan pemerintah daerah.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Izin, Pimpinan, sedikit mungkin.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Pak, konkritnya saya usul, Pak, ini kayak kita di Kotaku dulu, penanganan kumuh itu kan, ada skalanya kecil ya, yang 1 M, terakhir kan dananya 750, Pak. Ada yang salah kawasan Pak, yang sampai 10 miliar yang kontraktual. *Nah*, maksud saya Pak, saya setuju *nih*, saya baca punya Bapak, salah satu penanganannya adalah penanganan akses dan jalan lingkungan, nah kadang-kadang akses itu memang antara satu desa ke desa lain, Pak, itu bisa dengan penanganannya melalui PISEW misalnya, tapi ada akses seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih besar, *ndak* cukup dengan dana PISEW, Pak.

Nah, maksudnya kalau bisa itu memang skala kawasan, dia tidak masuk dalam, *ndak* bisa dimasukkan di infrastruktur jalan daerah, Pak, *ndak* bisa masuk, karena dia jalan desa, cuma panjang, kalau itu mengharapkan PISEW, itu *ndak* akan selesai. *Nah*, maksud saya saya usul saja, memang akan berpikir kita membuat program baru, kalau PISEW itu adalah skalanya skala kecil, seperti Kotaku, *nah*, buat skalanya skala besar untuk penanganan khusus untuk desa sangat tertinggal yang saya sampaikan tadi, Pak. Sehingga jelas konkrit *gitu*, karena PISEW saya usulkan, PISEW Pak, waduh *ndak* 10 tahun *nggak* selesai, apalagi syaratnya kemarin satu kecamatan *tuh* hanya satu dapat PISEW kegiatan PISEW-nya, *gitu* Pak, konkretnya itu Pak, usulannya agar bisa dipikirkan untuk BPIW.

KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ini mungkin jadi bahan pemikiran kami juga.

Kemudian, yang disampaikan Bu Cen Sui Lan DPP Batam, itu merupakan daerah prioritas pariwisata, Daerah Pariwisata Prioritas yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Bu. Dan, hal ini juga masuk dalam RPJMN di *major project* nomor 8 yaitu pembangunan wilayah Bintan Batam, dalam MP 8 ini salah satu *highlight*-nya adalah merintis destinasi pariwisata baru di DPP Batam-Bintan. Dengan adanya, DPP di RPJM ini artinya nanti destinasi pariwisata prioritas ada 8 lokasi yang salah satunya itu di Batam-Bintan ini dan deliniasi kawasan tersebut mencakup Pulau Batam dan Pulau Bintan. Sehingga, ini juga masuk dalam KSPN, Nongsa, Pulau Abang, dan sekitarnya dan KSPN Lagoi. Sehingga, ini nantinya menjadi kawasan prioritas untuk pengembangan ini Bu, Bu Cen.

Yang terkait dengan Pak Willem, ini survei ini, Pak, ini survei ini dilakukan secara kolaborasi. Jadi, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, kemudian dari BKKBN dan juga dari BPIW, ini bersama-sama untuk mengecek di lokasi ini, memang terkadang untuk BSPS ini, ada hasil verifikasi yang berdasarkan kriteria itu belum bisa dimasukkan, padahal hal-hal yang sebetulnya cukup sepele misalnya belum punya KTP dan Kartu Keluarga, ini contohnya di Papua ini, ada 192 KK yang tidak bisa ini. Ini, ini ke depannya harus diperbaiki sehingga bisa masuk dalam *batch* berikutnya, sehingga bukan sekedar hanya ini tidak terpilih, tapi ini bisa menjadi stok program ataupun tindak lanjut di tahap berikutnya, dan tentu ini untuk penanganan PKE ini, kita memang betul-betul melakukan survei supaya tepat sasaran, jadi memang betul-betul masyarakat yang dengan pendapatan sangat rendah yaitu kurang lebih 1,9 dolar per bulannya itu kalau standar dari WHO.

Kemudian, terkait perbedaan data tim verifikasi kolaborasi akan mengecek kembali, ini akan melakukan perbaikan-perbaikan dan ini dilakukan secara terus-menerus.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Interupsi, Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Terkait, saya pikir terkait kriteria-kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian, saya pikir tidak harus terjadi penyamaan definisi dan diperlakukan sama se-Indonesia. Karena seperti halnya kami di Papua listrik saja *nggak* punya, apalagi yang lain, uang aja mereka *nggak* tahu. Jadi, kalau pakai pola pendekatan seperti itu maka kami akan jauh dari sentuhan kultur modern, jauh dari sentuhan peradaban kultur modern, karena sampai hari ini kami masih ada dalam posisi itu, dan memang masuk ke sana saja harus pakai pesawat. Sehingga, ini juga dihadapkan pada tim di lapangan, bagaimana mereka turun melakukan pendataan, dan itu sehingga menyebabkan proses waktu yang lama, sehingga syarat-syarat kriteria yang

mereka tentukan itu tidak memenuhi, tidak memenuhi syarat. Karena itu kami harapkan supaya tidak terjadi penyamaan definisi dan diperlakukan sama se-indonesia, tapi kalau bisa, bisa menggunakan pendekatan sesuai kondisi yang ada, sesuai dengan kondisi *local wisdom*.

KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Baik, Pak.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Yang ada di daerah masing-masing.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Kalau terjadi seperti itu maka kita kami akan selalu tertinggal. Sampai hari ini saja Dapil saya, saya tidak pernah bawa teman-teman mitra komisi apa...teman-teman Komisi V Pimpinan dan juga Kementerian PUPR-lah, bahkan Kementerian Perhubungan, kementerian, tidak pernah sampai hari ini, walaupun saya sudah 10 tahun. Sehingga, kalau dengan cara begini kami semakin diabaikan dari sentuhan pembangunan.

Jadi, kalau bisa untuk Papua jangan pakai cara itu, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Pak, ini menjadi catatan penting Pak. Bahwa apa yang disampaikan beliau itu saya sudah juga sampaikan beberapa kali, bahwa tidak boleh disamakan kami, saya kebetulan juga satu Dapil sama beliau. Ini kalau dilakukan itu maka kami ya, tidak mungkin, masyarakat kami masih banyak yang belum punya data itu. Jadi, ini yang perlu juga memang harus diperhatikan dan yakin bahwa kami jaminannya, yakin bahwa kami jaminannya sebagai Anggota Dewan, memberikan kepada masyarakat kami ya sudahlah, berikan itu, kan orangnya ada, tempatnya ada ya kan, tapi syaratnya *nggak ada nih* Pak, ini syarat-syaratnya, syaratnya saja kan syaratnya yang siapa yang tanggung jawab, ya pemerintahlah, pemerintah belum bisa masuk ke situ tapi tolong ini diberikan. Jadi, ini hal-hal ini yang memberatkan kami terutama masyarakat kami yang ada di daerah yang memang tertinggal dan itu tidak kemampuannya tidak ada.

Ada satu lagi saya ini Pak Sekjen, saya juga ingin sampaikan saya lupa. Kemarin, kami di daerah saya di Yahukimo itu sampai pemerintah daerah sudah menjamin karena harus angkutan bahan bangunannya itu harus pakai pesawat, sudah kamilah yang sewa pesawat, Pak, masyarakat kami butuh itu, kerja sama dengan saya selaku Anggota Dewan untuk program itu datang ke sana, ya kan, jaminan keamanan kami ini, kami yang bawa itu, Bupati, Wakil

Bupatinya, *concern* untuk itu, ketemu dengan tim teman-teman dari kementerian, tapi masih, *wah* tidak bisa Pak, ini-ini, *waduh*, padahal kan sudah menjanjikan masyarakat. Saya sudah sampaikan, *oke* ini akan saya berikan, kasih untuk ke kampung ini, desa ini, ya, sudah di itu, pemerintah daerah sudah sosialisasi, ya kan. Terus bagaimana kalau kami pindahkan itu, sampai pimpinan daerah, *oke*, kalau itu kami sewa pesawat, sewa pesawat itu mahal, Pak, tapi mereka menyanggupi, itu pemerintah daerah memberikan angkutan dengan menyewa pesawat, karena tidak ada jalan darat *gitu*, Pak. Jadi, saya kira hal-hal ini juga menjadi tanggung jawab, dan saya lupa *nih*, apa Sekretaris Jenderal supaya menjadi catatan, seperti tempat saya, kemarin rumah susun, *wah* Pak Roberth katanya ini anggarannya cuma sekian jadi Bapak *nggak* bisa dapat sekian unit, kalau bicara itu kan kita bicarakan dikasih unit. Pak Roberth ini ada dua unit, tiga unit, tapi karena ini *nggak* bisa anggarannya di sana besar, *nah* kan BSPS kan kita dibedakan, yang lain 20 kita 40.

Nah, tolong di perencanaan juga bahwa sudah ada alokasi untuk yang di Papua itu beberapa dan itu anggarannya sekian *gitu*, jangan disamakan dengan yang lain Pak, saya mohon, saya mohon, supaya jangan disamakan. Ujungnya nanti kayak kemarin saya diminta seperti itu, sama saya kita harus protes, tiap kali protes terus ya kan. Ini karena anggaran satu unit cuman sekian, jadi Pak Robert tidak bisa. *Loh* kalau begitu dikasih anggaran *dong* sama saya, ada anggaran sekian Pak Robert terserah mau bikin rumah susun berapa, iya kan. Rumah susun kan dikasih unit sekian, ASN sekian, untuk yang sekian. Nilainya kalau di Papua ya untuk di Papua nilainya harus dua kali lipat, karena tingkat kemahalan di sana beda dengan di Jawa 300 sekian persen lebihnya begitu.

Jadi ini menjadi catatan Pak, mohon maaf lupa kemarin juga menyampaikan ini, tapi ini melalui Sekjen tolong ini juga perhatian, Pak, iya makasih.

KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Ya Pak, saya lanjut sedikit Pak, ini yang terkait dengan Pak Suryadi. Jadi, perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah ini juga kami *superimposed*-kan dengan pengembangan infrastruktur yang lain, yang contohnya misalnya

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Begini Pak, saya tidak *anu aja cuman* bilang, bahwa Cipta Karya itu yang proyeknya semakin besar, saya khawatir kalau fungsinya itu dulu dukungan, tapi kalau KSPN itu penugasan. *Nah*, kalau dukungan, itu mesti usulnya pemerintah daerah, karena Cipta Karya *nggak* punya apa-apa, punyanya duit, jadi selesai yang mengelola pemerintah daerah, itu kalau *anu...*kawasan wisata, tapi kalau KSPN itu Instruksi Presiden. Jadi, Cipta Karya *nggak* boleh jalan sendiri, oleh karena itu aku lewat Pak Sekjen, Pak Dirjen ini, inilah kesempatan peranan BPIW *anu...*mengkordinasikan itu, itu *aja*.

Pak Sekjen, saya mohon ini betul-betul dapat, Cipta Karya semakin banyak ini nanti setelah selesainya siapa yang mengelola, tapi kalau KSPN sudah ada kesepakatan semua tanggung jawab. Jadi misalnya, saya tidak iri misalnya ada kawasan Balekambang, Gunung Kemukus, Lasem, itu aspirasi bupati, ya silakan, tapi kalau KSPN saya *nggak* boleh Cipta Karya jalan sendiri, karena itu semua itu harus bertanggung jawab. Inilah kemudian kalau mengangkat, kalau mau mengangkat perananan BPIW di sini, Pak. Jadi, tidak hanya jadi pengikut *aja*, tapi kalau sudah perencanaan BPIW harus di depan Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih, Pak Sudjadi.

KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Sepakat dengan Pak Sudjadi, Pak. Jadi artinya kalau untuk suatu pengembangan kawasan, ini harus terintegrasi antara sektor, dan itu tentu harus disepakati bersama, sehingga benar-benar itu bisa saling mendukung. *Nah*, ini terkait dengan yang disampaikan Pak Suryadi tadi seperti Perhubungan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara ini akses jalan simpul, simpul mencapai ke jalan akses utama atau jalan nasional, ini kemarin sudah kami lakukan delimitasi bersama-sama dan dilakukan *superimposed* dari perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen kami yaitu dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah masing-masing provinsi. Sehingga, itu ke pusat satu, pusat wilayah satu, kemarin sudah melakukan dengan Kementerian Perhubungan, Pak.

Mungkin itu saja, Pimpinan, yang dapat kami sampaikan nanti sisanya akan kami sampaikan secara tertulis, makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, ya demikian, demikianlah penjelasan dan tanggapan dari Sekjen, Irjen, dan Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila tidak ada hal-hal yang perlu dibahas lagi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283, Peraturan Tata Tertib DPR RI kita akan merumuskan keputusan kesimpulan RDP pada hari ini, untuk itu *mari tayangin*, kasih kesimpulan.

Baik saya bacakan ya,

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis, 8 Juni 2023.

1. Komisi V DPR RI meminta Setjen, Itjen, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, di mana capaian per 5 Juni 2023, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal, Realisasi Anggaran 30,31%, Realisasi Fisik 32,38%.
 - b. Inspektur Jenderal, Realisasi Keuangan 34,99%, Realisasi Fisik 37,12%.
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Realisasi Keuangan 30,90%, Realisasi Fisik 30,94%.
 - d. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Realisasi Keuangan 35,73%, Realisasi Fisik 36,02%.
2. Komisi V DPR RI, memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- a. Unit organisasi Eselon I, Seketariat Jenderal, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024, 584,7 juta 802 rupiah, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024, Rp568.736.341.000, oh ribu, oke, selisih *backlog* Rp15.271.461.000.
 - b. Inspektur Jenderal, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024, 136.400.000.000. Pagu Indikatif 91.232.000.000, selisih 45.168.000.000.
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024, Rp611.890.525.000, Pagu Indikatif 425.138.972.000, selisih 186.751.553.000.
 - d. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024, Rp231.777.669.000. Pagu Indikatif Rp141.603.087.000, selisih 90.174.582.000.

Yang ketiga, Komisi V DPR RI sepakat....

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Sebentar, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya?

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya hanya mengingatkan seumur-umur 12 tahun pada Pak Menteri masih Irjen, anggarannya tidak pernah lebih dari 100 miliar, kasihan Pak, sama Pak Irjen, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makanya tadi saya bilang komitmen dulu dia, kita naikkan, ya kan, kita lihat kinerja, *gitu*. Kalau komitmennya kita bagus, ya kita harus bisa naikkan, karena ini bukan patokan ini baru usulan.

Baik yang ketiga:

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW, Kementerian PUPR, untuk menyesuaikan rincian program dan penyempur...menyempurnaan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Tanggapan Anggota masih ada? Setuju? Anggota setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Pemerintah setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Makanya kan saya kasih kosong di bawah itu, masih punya peluang tinggal.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Pak Ketua, tolong Itjen 2009 di bawah 100, saya usul, belum ... Pak Menteri pada Itjen *nggak* mau, jangan, jangan jangan sampai. Sekarang itu di bawah 100.

KETUA RAPAT:

Iya, naik cuman 1 miliar, ya, 1 miliar kurang 3 juta, Pak Sudjadi tambah 3 juta, jadi bisa 1 miliar. Ya baik, nanti lihat kita koreksi yang lain ya. Tapi Bapak ingat, kinerja yang saya butuhkan itu untuk segera.

Baik setuju semua ya, oke.

Demikianlah, Saudara-Saudara, rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan, semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dalam, dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara, amin.

Apabila sudah tidak ada hal-hal lain lagi, pada Rapat Dengar Pendapat pada siang hari ini, sebelum saya tutup, saya minta *statement* terakhir, kata-kata terakhir dari Saudara Sekjen, silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Terima kasih, kami mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan masukan, bahkan tadi informasi yang sangat berharga untuk kami tindak lanjut. Sekali lagi terima kasih mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dalam proses rapat dengar pendapat ini, makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya, apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan lagi maka rapat dengar pendapat ini, sebelum saya tutup saya mohon maaf untuk Pak Sekjen, Irjen, dan semua, karena tadi kita tidak *break* makan ya, mohon maaf, kita semua saya juga belum makan tadi, tapi saya lihat kuenya pasti habis semua ya.

Ya, jadi ini catatan juga untuk, Bu Nunik, ya, tolong buat jadwal kita jangan 4 jam, kalau bisa 5, jadi 2 jam 1 jam istirahat 2 jam lagi, *gitu*, jam 10, jam 12 harus kita istirahat makan *gitu* ya, siapa yang ulang tahun, *oh* ya itu makanya, saya saja *nggak* ikut makan ulang tahun, ya.

Baik, maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB)

JAKARTA, 8 Juni 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002